

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS	1
	1.2. Tujuan Penyusunan PPAS	3
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS	4
	1.4. Sistematika Penulisan PPAS Tahun 2023	7
BAB II	RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	9
	2.1. Rencana Pendapatan Daerah	9
	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10
	2. Pendapatan Transfer	10
	3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11
	2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan	11
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	13
	3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional (Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Prioritas Nasional Tahun 2023)	13
	3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan Prioritas Provinsi Lampung	46
	3.3. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah	63
	A. Prioritas 1 : Memantapkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan Masyarakat	63
	B. Prioritas 2 : Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Pelayanan Pendidikan Dan SDM	64
	C. Prioritas 3 : Memantapkan Infrastruktur Perkotaan Yang Berwawasan Lingkungan	65
	D. Prioritas 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Perdagangan Dan Jasa	66
	E. Prioritas 5 : Meningkatkan Ketertiban Dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	67
	F. Prioritas 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif	68
	3.4. Prioritas Program / Kegiatan Dan Indikator Kinerja	74
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	421
	4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah	421
	4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	558
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	562
BAB VI	P E N U T U P	564

DAFTAR TABEL

II.1. Target Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023	12
III.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	15
III.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	46
III.3. Prioritas Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2023	69
III.4. Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Indikator Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023	75
IV.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program Kegiatan	424
IV.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan	561
V.1. Target Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	563

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 74/MOU/HK/2022

NOMOR : 10/BA/DPRD-BL/2022

TANGGAL : 12 Agustus 2022

T E N T A N G

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EVA DWIANA.**
Jabatan : **WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**
Alamat Kantor : **Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung.**

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung

2. a. Nama : **Hi. WIYADI, SP, MM.**
Jabatan : **KETUA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG**
Alamat Kantor : **Jl. Basuki Rakhmat No.21 Bandar Lampung.**
- b. Nama : **ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.**
Jabatan : **WAKIL KETUA I DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG**
Alamat Kantor : **Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.**
- c. Nama : **AEP SARIPUDIN, SP.**
Jabatan : **WAKIL KETUA II DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG**
Alamat Kantor : **Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.**
- d. Nama : **Hi. EDISON HADJAR, SE.**
Jabatan : **WAKIL KETUA III DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG**
Alamat Kantor : **Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.**

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan OPD, Plafon Anggaran Sementara Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2022

<p>WALIKOTA BANDAR LAMPUNG</p> <p>selaku PIHAK PERTAMA</p>  <p><u>EVA DWIANA</u></p>	<p>PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG</p> <p>selaku PIHAK KEDUA</p>  <p><u>HI. WIYADI, SP, MM.</u> KETUA</p>
	<p><u>ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.</u> WAKIL KETUA I</p>  <p><u>AEP SARIPUDIN, SP</u> WAKIL KETUA II</p>  <p><u>HI. EDISON HADJAR, SE.</u> WAKIL KETUA III</p>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS

Pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran APBD. Pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan program kerja yang optimal. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada. Salah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). PPAS Kota Bandar Lampung Tahun 2023 juga disusun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2023 dan disinergikan dan diselaraskan dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dinyatakan bahwa PPAS Tahun Anggaran 2023 Pemerintah kabupaten/kota mencantumkan:

1. sinergitas dan penyalarsan program pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
3. prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2023.



PPAS menggambarkan pagu anggaran sementara untuk Pendapatan, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, serta Pembiayaan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD disetujui antara Kepala Daerah bersama DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD.

Penyusunan PPAS merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. Kebijakan di bidang keuangan merupakan pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah.

Penyusunan PPAS serta rancangan APBD menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan Peraturan yang mengatur mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan PPAS serta rancangan APBD dimaksud dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Mekanisme penyusunan anggaran telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Prioritas Belanja Daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi: (1) prioritas pembangunan daerah berdasarkan prioritas daerah yang terdiri dari prioritas daerah, sasaran yang ingin dicapai, program, indikatornya dan Organisasi Perangkat Daerah yang



melaksanakan; (2) prioritas program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerjanya. Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan (1) Plafon Anggaran Sementara menurut urusan pemerintahan daerah, OPD, program, kegiatan, sub kegiatan dan (2) Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing Belanja dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Proses penyusunan dokumen PPAS Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Adapun tahapan penyusunan dokumen PPAS adalah : (1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah, (2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat dan Prioritas serta program Provinsi yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi setiap tahun untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan (3) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dengan tahapan tersebut, diharapkan penentuan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari gambaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa dokumen PPAS mempunyai peran dan fungsi yang sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan PPAS yang berkualitas dan akuntabel maka diharapkan dokumen APBD yang tersusun juga berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat Kota Bandar Lampung.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Memperhatikan kondisi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam KUA tahun 2023 maka penyusunan dokumen PPAS Kota Bandar Lampung Tahun 2023 bertujuan:

1. Menyusun pedoman yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD tahun 2023;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2023 menurut urusan pemerintahan daerah, OPD penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan;



3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk menyusun dokumen perencanaan penganggaran yang di sepakati bersama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan DPRD Kota Bandar Lampung untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2011



- tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – 2025;
 27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021--2026;
 28. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan PPAS Tahun 2023

PPAS Kota Bandar Lampung Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
 - I.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS
 - I.2. Tujuan Penyusunan PPAS
 - I.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS
 - I.4. Sistematika Penulisan PPAS Tahun 2022
- II. Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023
 - 2.1. Target Pendapatan Daerah
 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 2. Pendapatan Transfer
 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan
- III. Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 - 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap Prioritas Pembangunan Nasional (Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Prioritas Nasional tahun 2023)
 - 3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Prioritas Provinsi
 - 3.3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah
- IV. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan



- 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 - 4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
- V. Rencana Pembiayaan Daerah
- VI. Penutup



BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2023 diarahkan melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil pajak/bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah tersebut meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penganggaran pendapatan dalam konteks Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun 2022 dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah.

2.1. Rencana Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung, maka Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.774.364.610.239,80. mengalami kenaikan 18,48 persen (%) atau sebesar Rp.432.663.708.329,80. dibandingkan Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.341.700.902.000,00. Secara terperinci target Pendapatan Daerah sesuai dengan kelompok pendapatan sebagai berikut :



1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- A. Penetapan target PAD dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, realisasi penerimaan PAD tahun 2022, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- B. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan langkah-langkah sebagai berikut : Efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pendapatan, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dengan Basis Data dan Sistem Informasi yang tepat dan akurat, mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan pada Kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang *efisien, efektif*, cepat dan tepat, meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan optimalisasi sistem *insentif* bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- C. Dalam hal jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka penetapan pendapatannya mengacu pada Peraturan Daerah yang ada yang telah direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- D. Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.800.000.000.000,00. atau masih sama dengan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam APBD Tahun Anggaran 2023, direncanakan sebesar Rp.1.862.668.130.239,80. (yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah)

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2023 dianggarkan sebesar



Rp.68.856.672.000,00. Dana Bagi Hasil tersebut bersumber dari pajak dan sumber daya alam

2. Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.201.094.731.000,00.
3. Dana Perimbangan Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.357.504.692.000,00.
4. Dana Insentif Daerah Dana Transfer Khusus Insentif Daerah pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.40.212.035.239,80,00.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Pendapatan Bagi Hasil Transfer Pemerintah Provinsi Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.195.000.000.000,00. yakni merupakan bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang dibagikan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/ kota di wilayahnya.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan rencana target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Tahun 2023, Yang berasal dari Pendapatan Hibah sebesar Rp.4.961.250.000,00. dan dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan sebesar Rp.106.735.230.000,00.

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 sebesar Rp.25.000.000.000,00.

Secara terperinci target Pendapatan Daerah dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel II.1.





BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Keberhasilan pembangunan, pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan *konkuren* yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan penunjang urusan pemerintahan.

Selain itu, Belanja Daerah juga digunakan untuk mendukung capaian target prioritas pembangunan daerah yang bersinergi dengan target prioritas nasional dan provinsi sesuai dengan kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 bahwa kebijakan anggaran belanja berdasarkan *Money Follows Program* yaitu dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi.

3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap Prioritas Pembangunan Nasional (Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Prioritas Nasional Tahun 2023)

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Sinkronisasi tersebut guna mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Tahun Anggaran 2021, maka sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan prioritas nasional dapat dilihat pada Tabel III.1.



3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan Prioritas Provinsi Lampung

Adapun sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan prioritas Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel III.2.



3.3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2023, prioritas pembangunan Kota Bandar Lampung yang menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2023 diarahkan pada 6 (enam) bidang pembangunan, yaitu: (1) Bidang infrastruktur dan kesehatan, (2) Bidang infrastruktur, pendidikan dan SDM, (3) Bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, (4) Bidang perekonomian daerah melalui perdagangan dan jasa, (5) Bidang ketertiban dan keamanan daerah (6) Bidang *Good Governance* dan Pelayanan Publik.

Seiring dengan hal tersebut maka tema rencana pembangunan tahunan/tema RKPD Tahun 2023 adalah "***Percepatan Pemulihan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Daerah melalui Pembangunan Berkelanjutan***" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi;
2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas;
3. Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan;
4. Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah;
6. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

A. Prioritas 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi;

Program pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2023 yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan sesuai dengan prioritas 1 adalah:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman
4. Program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Program Pengendalian Penduduk
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)



7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
8. Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)
9. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
10. Program Pembinaan Perpustakaan
11. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
12. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
13. Program Perlindungan Perempuan
14. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
15. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
16. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
17. Program Perlindungan Khusus Anak
18. Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan
19. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
20. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

B. Prioritas 2 : Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas;

Program pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2023 yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan sesuai dengan prioritas 2 adalah:

1. Program Pengembangan Pemukiman
2. Program Peyelenggaraan Jalan
3. Program Pengembangan Jasa Kontruksi
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM)
7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (SPM)
8. Program Pengembangan Perumahan (SPM)
9. Program Kawasan Pemukiman
10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
11. Program Penataan Bangunan Gedung
12. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
13. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
14. Program Pengelolaan Izin Lokasi
15. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi



16. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
17. Program Pengelolaan Perkeretaapian

C. Prioritas 3 : Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan;

Program pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2023 yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan sesuai dengan prioritas 3 adalah:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten Kota
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
5. Program Pengembangan Ekspor
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
7. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
8. Program Pemasaran Pariwisata
9. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
12. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
13. Program Pendidikan dan Latihan Perkopersian
14. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
15. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
16. Program Pengembangan UMKM
17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
18. Program Promosi Penanaman Modal
19. Program Pelayanan Penanaman Modal
20. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
21. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
22. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
23. Program Perencanaan Tenaga Kerja
24. Program Hubungan Industrial
25. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
26. Program Penempatan Tenaga Kerja



27. Program Pemberdayaan Sosial
28. Program Administrasi Pemerintah Desa
29. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
30. Program Pemebrdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
31. Program Peningkatan Deversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
32. Program Penanganan Kerawanan Pangan
33. Program Pengawasan Keamanan Pangan
34. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
35. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
36. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
37. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
38. Program Penyuluhan Pertanian
39. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
40. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
41. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
42. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
43. Program Rehabilitasi Sosial (SPM)
44. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
45. Program Penanganan Bencana (SPM)

D. Prioritas 4 : Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal;

Program pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2023 yang menjadi proritas untuk dilaksanakan sesuai dengan prioritas 4 adalah:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (SPM)
2. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidkan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
7. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial



8. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
9. Program Pengembangan Kebudayaan
10. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
11. Program Pembinaan Sejarah

E. Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah;

Program pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2023 yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan sesuai dengan prioritas 5 adalah:

1. Program Administrasi Umum
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan
4. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kota
5. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
6. Program Kepegawaian Daerah
7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Program Penyelenggaraan Pengawasan
9. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
10. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
11. Program pendaftaran Penduduk
12. Program Pencatatan Sipil
13. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
14. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
15. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
16. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
17. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
19. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
20. Program Perekonomian dan Pembangunan
21. Program Informasi dan Komunikasi Publik
22. Program Aplikasi Informatika
23. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
24. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
25. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota



26. Program Administrasi Umum
27. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
28. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
29. Program Pengelolaan Arsip
30. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

F. Prioritas 6 : Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Program pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2023 yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan sesuai dengan prioritas 6 adalah:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
7. Program Pengelolaan Persampahan
8. Program Penanggulangan Bencana (SPM)
9. Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (SPM)

Secara rinci Prioritas Pembangunan Kota Bandar Lampung berdasarkan Prioritas Nasional Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel III.3.













3.4. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kota Bandar Lampung Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel III.4.



BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 maka urusan yang menjadi kewenangan daerah akan dilaksanakan oleh OPD se-Kota Bandar Lampung.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yakni selain untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan (klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - (a) pendidikan,
 - (b) kesehatan,
 - (c) pekerjaan umum dan penataan ruang,
 - (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
 - (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
 - (f) sosial.

- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar



meliputi:

- (a) Tenaga kerja,
- (b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- (c) Pangan,
- (d) Pertanahan,
- (e) Lingkungan hidup,
- (f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
- (g) Pemberdayaan masyarakat,
- (h) Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana,
- (i) Perhubungan,
- (j) Komunikasi dan informatika,
- (k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah,
- (l) Penanaman modal,
- (m) Kepemudaan dan olahraga,
- (n) Statistik,
- (o) Persandian,
- (p) Kebudayaan,
- (q) Perpustakaan, dan
- (r) Kearsipan.

3) Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- (a) Kelautan dan perikanan,
- (b) Pariwisata,
- (c) Pertanian,
- (d) Perdagangan,
- (g) Perindustrian, dan
- (h) Transmigrasi.

4) Unsur pendukung, meliputi:

- (a) Sekretariat Daerah; dan
- (b) Sekretariat DPRD.

5) Unsur penunjang, meliputi:

- (a) Perencanaan;
- (b) Keuangan;
- (c) Kepegawaian;
- (d) Pendidikan dan pelatihan;



- (e) Penelitian dan pengembangan;
- 6) Unsur pengawas yaitu inspektorat;
- 7) Unsur kewilayahan, meliputi:
 - (a) Kecamatan.
- 8) Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik.

Berdasarkan urusan pemerintahan baik urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan, serta unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan tersebut, maka plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan, satuan kerja / OPD dan program / kegiatan / sub kegiatan tahun 2023 secara terinci dapat dilihat pada Tabel IV.1.



4.2.Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui Sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam Periode tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

A. Belanja operasi;

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja bunga;
4. Belanja subsidi;
5. Belanja hibah; dan
6. Belanja bantuan sosial.

B. Belanja modal

C. Belanja tidak terduga; dan

D. Belanja transfer.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1. Belanja bagi hasil; dan
2. Belanja bantuan keuangan

1. Belanja Pegawai

- a) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi, dan penambahan PNSD Kota Bandar Lampung pada tahun 2022, maka diperhitungkan *acress* untuk Belanja Pegawai sebesar 2,5 persen (%).
- b) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, maka dianggarkan biaya pemungutan pajak daerah sebesar 5 persen (%) dari target penerimaan pajak daerah tahun 2023.
- c) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan Belanja Pegawai dalam rangka perhitungan DAU perubahan Tahun Anggaran 2022, serta



memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, serta pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas.

- d) Belanja Pegawai pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp.1.036.484.065.582,90. atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp.980.047.830.863,60.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Dan Jasa dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Alokasi anggaran untuk belanja barang dan jasa pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.1.152.531.335.678,44.

3. Belanja Bunga

Belanja Bunga dianggarkan untuk membayar bunga pinjaman pemerintah. Alokasi anggaran untuk Belanja Bunga pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.20.396.250.000,00.

4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan milik pemerintah atau pihak ke tiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimport barang dan atw jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas pada umumnya. Dengan kondisi perekonomian saat ini, Alokasi anggaran Belanja Subsidi direncanakan sebesar Rp.675.516.689,00.

5. Belanja Hibah

Belanja Hibah dimaksudkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah baik yang dilaksanakan oleh organisasi sosial, organisasi masyarakat, lembaga perorangan, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga lainnya serta bantuan terhadap Partai Politik dengan mengacu pada ketentuan tentang tata cara pemberian hibah yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.114.156.586.486,15. mengalami kenaikan sebesar Rp.24.201.020.228,15.



dibandingkan dengan anggaran Belanja Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.89.955.566.258,00.

6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Bandar Lampung. Bantuan sosial diberikan kepada kelompok /anggota masyarakat yang dalam pemberiannya tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Alokasi anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.10.906.900.000,00.

7. Belanja Modal

Penganggaran belanja modal diperuntukan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih untuk mendukung jalannya kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Bandar Lampung. Alokasi anggaran untuk belanja modal tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.332.138.955.803,31.

8. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun 2022 dan akan digunakan untuk estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar pengaruh pemerintah kota Bandar Lampung serta tidak biasa/tanggap darurat yang belum tertampung dalam bentuk Program dan Kegiatan pada OPD. Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.40.075.000.000,00.

9. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kelurahan Dan Partai Politik

Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja yang dialokasikan untuk pemerintahan kelurahan dan partai politik. Alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan tidak direncanakan pada tahun 2023.

Secara terinci, Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dapat dilihat pada Tabel IV.2.





BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); (b) pencairan dana cadangan; (c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (d) penerimaan pinjaman daerah; (e) penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan; (f) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Pada Tahun Anggaran 2023 Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan adalah SiLPA dan Penerimaan Pinjaman dari Sarana Multi Infrastruktur. SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2022.

Selanjutnya Pengeluaran Pembiayaan mencakup (a) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; (b) penyertaan modal daerah; (c) pembentukan dana cadangan; (d) pemberian pinjaman daerah; dan/atau (e) pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun Anggaran 2023 Pengeluaran Pembiayaan direncanakan dianggarkan sebesar Rp.92.000.000.000,00 yang merupakan adalah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah pada BPR Bank Waway Kota Bandar Lampung sebesar Rp.5.000.000.000,00 Bank Syariah Kota Bandar Lampung sebesar Rp.2.500.000.000,00, PDAM Way Rilau sebesar Rp.39.500.000.000,00, Perusahaan Daerah (PD) Pasar sebesar Rp.1.000.000.000,00, Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan sebesar Rp.1.000.000.000,00, Bank Lampung Rp.3.000.000.000,00. serta pembayaran pokok hutang kepada Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp.40.000.000.000,00.

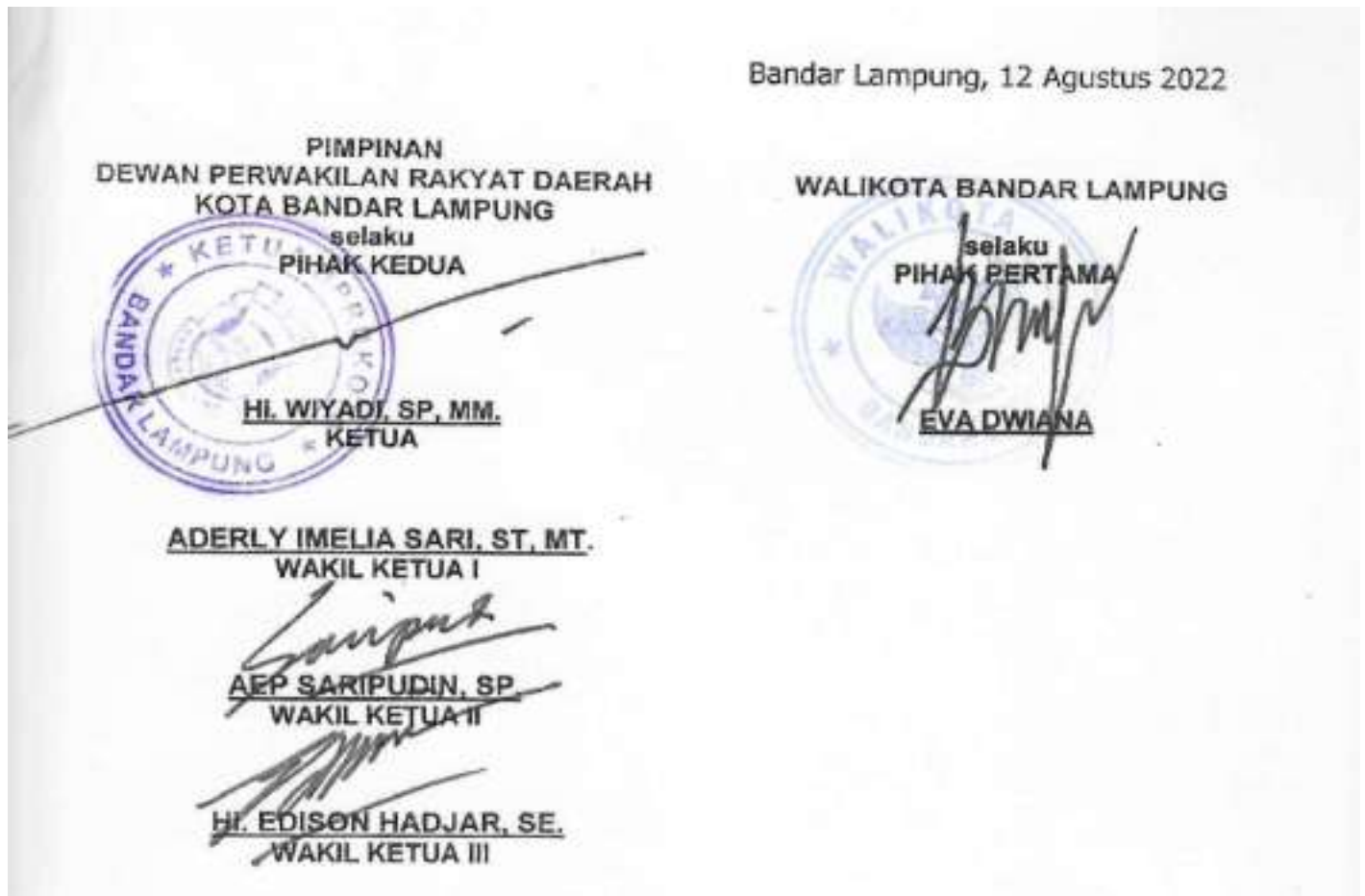
Secara rinci target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel V.1.





BAB VI PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.



**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 109 / MOU / HK / 2023

NOMOR : 10 / BA / DPRD-BL / 2023

TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2023

T E N T A N G

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **EVA DWIANA**
Jabatan : WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung.

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung

2. a. Nama : **Hi. WIYADI, SP. MM.**
Jabatan : KETUA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmat No. 21 Teluk Betung,
Bandar Lampung.
- b. Nama : **ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.**
Jabatan : WAKIL KETUA I DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmat No. 21 Teluk Betung,
Bandar Lampung.
- c. Nama : **AEP SARIPUDIN, SP.**
Jabatan : WAKIL KETUA II DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmat No. 21 Teluk Betung,
Bandar Lampung.
- d. Nama : **Hi. EDISON HADJAR, SE.**
Jabatan : WAKIL KETUA III DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmat No. 21 Teluk Betung,
Bandar Lampung

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD, perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD

Tahun Anggaran 2023 yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, program dan kegiatan, dan belanja tidak langsung, serta rencana Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan P-PPAS	1
	1.2. Tujuan Penyusunan P-PPAS	3
	1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan P-PPAS	4
BAB II	RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	8
	2.1. Rencana Pendapatan Daerah	8
	2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan	10
BAB III	PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	12
	3.1. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	12
	3.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	17
	3.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	171
BAB IV	PENUTUP	176

DAFTAR TABEL

TABEL II.1. TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	11
TABEL III.1. PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER-SKPD	15
TABEL III.2. RINCIAN PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD PER-PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023	20
TABEL III.3. PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, MODAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2023	175



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS

Pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran APBD. Pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan program kerja yang optimal. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada. Salah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang Selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Selanjutnya dalam Permendagri No. 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dinyatakan bahwa PPAS menggambarkan pagu anggaran sementara untuk Pendapatan, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, serta Pembiayaan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD disetujui antara Kepala Daerah bersama DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD.

Penyusunan Perubahan PPAS merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. Kebijakan di bidang keuangan merupakan pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka



untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan suatu pemerintah daerah.

Mekanisme penyusunan anggaran telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami revisi menjadi Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No.21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No.64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021.

Prioritas Belanja Daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi: (1) prioritas pembangunan daerah berdasarkan prioritas daerah yang terdiri dari prioritas daerah, sasaran yang ingin dicapai, program, indikatornya dan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan; (2) prioritas program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerjanya. Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan (1) Plafon Anggaran Sementara menurut urusan pemerintahan daerah, OPD, program, kegiatan, sub kegiatan dan (2) Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing Belanja dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bandar Lampung Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perencanaan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bandar Lampung Tahun 2023, sebagai salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan dokumen Perubahan PPAS Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dengan memperhatikan prinsip transparansi,



akuntabilitas dan partisipasi. Adapun tahapan penyusunan dokumen Perubahan PPAS adalah : (1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah, (2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat dan Prioritas serta program Provinsi yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi setiap tahun untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan (3) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Dengan tahapan tersebut, diharapkan penentuan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari gambaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa dokumen Perubahan PPAS mempunyai peran dan fungsi yang sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan Perubahan PPAS yang berkualitas dan akuntabel maka diharapkan dokumen Perubahan APBD yang tersusun juga berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat Kota Bandar Lampung.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

Memperhatikan kondisi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan KUA tahun 2023 maka penyusunan dokumen Perubahan PPAS Kota Bandar Lampung Tahun 2023 bertujuan:

1. Menyusun pedoman yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD tahun 2023;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2023 menurut urusan pemerintahan daerah, OPD penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan;
3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk menyusun dokumen perencanaan penganggaran yang di sepakati bersama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan DPRD Kota Bandar Lampung untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja



Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS

Dasar hukum penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan



- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;



27. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

**BAB II****RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH**

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2023 diarahkan melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil pajak/bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah tersebut meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penganggaran pendapatan dalam konteks Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun 2021 dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah.

2.1. Rencana Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 yang disepakati bersama oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung, maka Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.2.938.929.138.801,10 mengalami kenaikan 22,59 persen atau sebesar Rp.541.581.838.526,10 dibandingkan Pendapatan Daerah yang semula Tahun 2023 sebesar Rp.2.397.347.300.275,00.

Secara terperinci target Pendapatan Daerah sesuai dengan kelompok pendapatan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- A. Penetapan target PAD dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, realisasi penerimaan PAD



Tahun 2022, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

- B. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan langkah-langkah sebagai berikut : Efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pendapatan, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dengan Basis Data dan Sistem Informasi yang tepat dan akurat, mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan pada Kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang *efisien, efektif*, cepat dan tepat, meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan optimalisasi sistem *insentif* bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- C. Dalam hal jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka penetapan pendapatannya mengacu pada Peraturan Daerah yang ada yang telah direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- D. Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.341.175.137.526,10. Mengalami kenaikan Rp.541.175.137.526,10. dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang semula senilai Rp.800.000.000.000,00.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, direncanakan sebesar Rp.1.597.754.001.275,00. (yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah)

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Perubahan Anggaran tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.60.167.918.000,00. Dana Bagi Hasil tersebut bersumber dari pajak dan sumber daya alam



2. Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) pada perubahan anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.1.056.050.459.000,00.
3. Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus pada Perubahan anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.347.757.303.000,00.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Pendapatan Bagi Hasil-Transfer Pemerintah Provinsi-Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.133.778.321.275,00. yakni merupakan bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang dibagikan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/ kota di wilayahnya.

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Bandar Lampung pada perubahan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.40.596.491.243,90.

Secara terperinci target Pendapatan Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.397.347.300.275,00	2.938.929.138.801,10	541.581.838.526,10	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	800.000.000.000,00	1.341.175.137.526,10	541.175.137.526,10	
4.1.01.	Pajak Daerah	520.195.262.269,00	620.195.262.269,00	100.000.000.000,00	
4.1.02.	Retribusi Daerah	47.954.673.205,48	79.484.673.205,48	31.530.000.000,00	
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.276.185.222,10	40.276.185.222,10	9.000.000.000,00	
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	200.573.879.303,42	601.219.016.829,52	400.645.137.526,10	
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.597.347.300.275,00	1.597.754.001.275,00	406.701.000,00	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.463.568.979.000,00	1.463.975.680.000,00	406.701.000,00	
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	133.778.321.275,00	133.778.321.275,00	-	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	-	-	
4.3.02.	Dana Darurat	-	-	-	
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.397.347.300.275,00	2.938.929.138.801,10	541.581.838.526,10	

**BAB III****PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Keberhasilan pembangunan, pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi dalam penyusunan rancangan perubahan KUA dan PPA yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan *konkuren* yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan penunjang urusan pemerintahan.

Selain itu, Belanja Daerah juga digunakan untuk mendukung capaian target prioritas pembangunan daerah yang bersinergi dengan target prioritas nasional dan provinsi sesuai dengan kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 bahwa kebijakan anggaran belanja berdasarkan *Money Follows Program* yaitu dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi.

3.1. Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Per – Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 maka urusan yang menjadi kewenangan daerah akan dilaksanakan oleh OPD se-Kota Bandar Lampung.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yakni selain untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan juga digunakan untuk



mendanai pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan (klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - (a) pendidikan,
 - (b) kesehatan,
 - (c) pekerjaan umum dan penataan ruang,
 - (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
 - (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
 - (f) sosial.

- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - (a) Tenaga kerja,
 - (b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
 - (c) Pangan,
 - (d) Pertanahan,
 - (e) Lingkungan hidup,
 - (f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
 - (g) Pemberdayaan masyarakat,
 - (h) Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana,
 - (i) Perhubungan,
 - (j) Komunikasi dan informatika,
 - (k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah,
 - (l) Penanaman modal,
 - (m) Kepemudaan dan olahraga,
 - (n) Statistik,
 - (o) Persandian,
 - (p) Kebudayaan,
 - (q) Perpustakaan, dan
 - (r) Kearsipan.



2) Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- (a) Kelautan dan perikanan,
- (b) Pariwisata,
- (c) Pertanian,
- (d) Perdagangan,
- (g) Perindustrian, dan
- (h) Transrnigrasi.

3) Unsur pendukung, meliputi:

- (a) Sekretariat Daerah; dan
- (b) Sekretariat DPRD.

4) Unsur penunjang, meliputi:

- (a) Perencanaan;
- (b) Keuangan;
- (c) Kepegawaian;
- (d) Pendidikan dan pelatihan;
- (e) Penelitian dan pengembangan;

5) Unsur pengawas yaitu inspektorat;

6) Unsur kewilayahan, meliputi:

- (a) Kecamatan.

7) Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik.

Berdasarkan urusan pemerintahan baik urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan, serta unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan tersebut, maka Perubahan plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan, satuan kerja / OPD dan program / kegiatan / sub kegiatan tahun 2023 secara terinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

TABEL 3.1
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No.	Urusan / SKPD	Plafon Anggaran		BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
I.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.413.253.711.343,00	1.846.868.111.324,00	433.614.399.981,00
1	PENDIDIKAN	649.023.517.494,00	714.613.369.498,00	65.589.852.004,00
1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	649.023.517.494,00	714.613.369.498,00	65.589.852.004,00
2	KESEHATAN	341.959.735.537,00	444.141.230.608,00	102.181.495.071,00
2.1	Dinas Kesehatan	256.711.967.600,00	350.756.536.766,00	94.044.569.166,00
2.2	RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo	85.247.767.937,00	93.384.693.842,00	8.136.925.905,00
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	341.916.611.613,00	591.862.144.055,00	249.945.532.442,00
3.1	Dinas Pekerjaan Umum	339.614.451.613,00	587.880.050.255,00	248.265.598.642,00
3.2	Dinas Perumahan dan Permukiman	2.302.160.000,00	3.982.093.800,00	1.679.933.800,00
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.743.017.285,00	5.562.547.155,00	819.529.870,00
4.1	Dinas Pekerjaan Umum	360.000.000,00	360.000.000,00	-
4.2	Dinas Perumahan dan Permukiman	4.383.017.285,00	5.202.547.155,00	819.529.870,00
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	58.080.652.430,00	70.298.268.698,00	12.217.616.268,00
5.1	Satuan Polisi Pamong Praja	37.502.444.808,00	44.399.384.068,00	6.896.939.260,00
5.4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.883.274.990,00	14.670.663.590,00	3.787.388.600,00
5.6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.694.932.632,00	11.228.221.040,00	1.533.288.408,00
6	SOSIAL	17.530.176.984,00	20.390.551.310,00	2.860.374.326,00
6.1	Dinas Sosial	17.530.176.984,00	20.390.551.310,00	2.860.374.326,00
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	190.118.404.599,00	218.225.141.110,00	28.106.736.511,00
1	TENAGA KERJA	5.517.278.944,00	5.991.717.463,00	474.438.519,00
1.1	Dinas Tenaga Kerja	5.517.278.944,00	5.991.717.463,00	474.438.519,00
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.963.604.183,00	6.633.792.674,00	1.670.188.491,00
2.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.963.604.183,00	6.633.792.674,00	1.670.188.491,00
3	PANGAN	7.984.038.259,00	5.973.419.763,00	(2.010.618.496,00)
3.1	Dinas Pangan	7.984.038.259,00	5.973.419.763,00	(2.010.618.496,00)
4	LINGKUNGAN HIDUP	65.936.169.557,00	72.770.844.995,00	6.834.675.438,00
5.1	Dinas Lingkungan Hidup	65.936.169.557,00	72.770.844.995,00	6.834.675.438,00
5	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.181.417.299,00	11.983.883.326,00	2.802.466.027,00
6.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.181.417.299,00	11.983.883.326,00	2.802.466.027,00
6	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3.719.723.875,00	4.082.942.834,00	363.218.959,00
7.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	3.719.723.875,00	4.082.942.834,00	363.218.959,00
7	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	25.996.810.527,00	32.169.061.466,00	6.172.250.939,00
8.1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.996.810.527,00	32.169.061.466,00	6.172.250.939,00
8	PERHUBUNGAN	23.354.774.956,00	26.479.685.742,00	3.124.910.786,00
9.1	Dinas Perhubungan	23.354.774.956,00	26.479.685.742,00	3.124.910.786,00
9	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.205.019.593,00	13.786.780.957,00	4.581.761.364,00
10.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.205.019.593,00	13.786.780.957,00	4.581.761.364,00
10	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.213.045.961,00	5.795.016.042,00	581.970.081,00
11.1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	5.213.045.961,00	5.795.016.042,00	581.970.081,00
11	PENANAMAN MODAL	8.595.677.486,00	9.734.315.544,00	1.138.638.058,00
12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.595.677.486,00	9.734.315.544,00	1.138.638.058,00
12	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.835.454.078,00	14.589.305.301,00	1.753.851.223,00
13.1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12.835.454.078,00	14.589.305.301,00	1.753.851.223,00
13	STATISTIK	75.000.000,00	75.000.000,00	-
14.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	75.000.000,00	75.000.000,00	-
14	PERSANDIAN	-	161.000.000,00	161.000.000,00
15.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	161.000.000,00	161.000.000,00
15	KEBUDAYAAN	1.898.900.000,00	1.898.900.000,00	-
16.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.898.900.000,00	1.898.900.000,00	-
16	PERPUSTAKAAN	5.335.519.881,00	5.793.505.003,00	457.985.122,00
17.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.335.519.881,00	5.793.505.003,00	457.985.122,00
17	KEARSIPAN	305.970.000,00	305.970.000,00	-
18.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	305.970.000,00	305.970.000,00	-
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	41.628.810.255,11	48.861.270.958,11	7.232.460.703,00
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.340.389.932,00	5.463.057.998,00	1.122.668.066,00
1.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.340.389.932,00	5.463.057.998,00	1.122.668.066,00
2	PARIWISATA	7.761.085.630,00	8.339.511.874,00	578.426.244,00
2.1	Dinas Pariwisata	7.761.085.630,00	8.339.511.874,00	578.426.244,00
3	PERTANIAN	11.055.588.511,00	12.347.852.111,00	1.292.263.600,00
3.1	Dinas Pertanian	11.055.588.511,00	12.347.852.111,00	1.292.263.600,00
4	PERDAGANGAN	13.423.725.527,11	16.365.112.920,11	2.941.387.393,00
4.1	Dinas Perdagangan	13.423.725.527,11	16.365.112.920,11	2.941.387.393,00
5	PERINDUSTRIAN	5.048.020.655,00	6.345.736.055,00	1.297.715.400,00
5.1	Dinas Perindustrian	5.048.020.655,00	6.345.736.055,00	1.297.715.400,00
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	205.560.260.898,00	271.139.989.194,00	65.579.728.296,00
1	SEKRETARIAT DAERAH	106.495.089.687,00	158.007.065.162,00	51.511.975.475,00
1.1	Sekretariat Daerah	106.495.089.687,00	158.007.065.162,00	51.511.975.475,00
2	SEKRETARIAT DPRD	99.065.171.211,00	113.132.924.032,00	14.067.752.821,00
2.1	Sekretariat DPRD	99.065.171.211,00	113.132.924.032,00	14.067.752.821,00



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

V		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	268.385.917.987,89	254.355.471.974,89	(14.030.446.013,00)
1		PERENCANAAN	11.448.880.101,00	12.477.544.101,00	1.028.664.000,00
	1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.448.880.101,00	12.477.544.101,00	1.028.664.000,00
2		KEUANGAN	247.837.807.692,89	231.508.848.750,89	(16.328.958.942,00)
	2.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	187.147.318.403,89	169.749.633.773,89	(17.397.684.630,00)
	2.3	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	60.690.489.289,00	61.759.214.977,00	1.068.725.688,00
3		KEPEGAWAIAN	7.209.280.900,00	8.543.695.853,00	1.334.414.953,00
	3.1	Badan Kepegawaian Daerah	7.209.280.900,00	8.543.695.853,00	1.334.414.953,00
4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	739.949.294,00	628.233.270,00	(111.716.024,00)
	4.1	Badan Kepegawaian Daerah	739.949.294,00	628.233.270,00	(111.716.024,00)
5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.150.000.000,00	1.197.150.000,00	47.150.000,00
	5.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.150.000.000,00	1.197.150.000,00	47.150.000,00
VI		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	18.108.000.000,00	20.900.648.400,00	2.792.648.400,00
1		INSPEKTORAT DAERAH	18.108.000.000,00	20.900.648.400,00	2.792.648.400,00
	1.1	Inspektorat	18.108.000.000,00	20.900.648.400,00	2.792.648.400,00
VII		UNSUR KEWILAYAHAN	219.561.890.158,00	265.877.589.068,00	46.315.698.910,00
1		KECAMATAN	219.561.890.158,00	265.877.589.068,00	46.315.698.910,00
	1.1	Kecamatan Tanjungkarang Pusat	11.948.945.180,00	14.513.757.415,00	2.564.812.235,00
	1.2	Kecamatan Tanjungkarang Barat	11.616.694.968,00	14.085.129.795,00	2.468.434.827,00
	1.3	Kecamatan Tanjungkarang Timur	9.371.311.868,00	11.254.772.344,00	1.883.460.476,00
	1.4	Kecamatan Telukbetung Utara	11.218.628.771,00	13.564.869.511,00	2.346.240.740,00
	1.5	Kecamatan Telukbetung Barat	8.319.968.599,00	10.130.357.270,00	1.810.388.671,00
	1.6	Kecamatan Telukbetung Selatan	10.381.726.229,00	12.685.278.662,00	2.303.552.433,00
	1.7	Kecamatan Kedaton	11.200.678.339,00	13.658.833.966,00	2.458.155.627,00
	1.8	Kecamatan Sukarame	10.816.440.526,00	13.190.990.169,00	2.374.549.643,00
	1.9	Kecamatan Panjang	13.985.841.385,00	16.941.463.985,00	2.955.622.600,00
	1.10	Kecamatan Rajabasa	11.351.786.932,00	13.671.765.948,00	2.319.979.016,00
	1.11	Kecamatan Tanjung Senang	9.208.307.894,00	11.051.350.592,00	1.843.042.698,00
	1.12	Kecamatan Sukabumi	12.164.427.942,00	14.790.587.274,00	2.626.159.332,00
	1.13	Kecamatan Kemiling	16.863.795.208,00	20.343.025.826,00	3.479.230.618,00
	1.14	Kecamatan Enggal	9.725.014.877,00	11.843.324.015,00	2.118.309.138,00
	1.15	Kecamatan Kedamaian	11.193.470.717,00	13.581.000.779,00	2.387.530.062,00
	1.16	Kecamatan Telukbetung Timur	8.948.373.436,00	10.946.591.002,00	1.998.217.566,00
	1.17	Kecamatan Bumi Waras	10.359.678.956,00	12.447.880.563,00	2.088.201.607,00
	1.18	Kecamatan Labuhan Ratu	10.125.996.877,00	12.156.597.338,00	2.030.600.461,00
	1.19	Kecamatan Way Halim	12.755.587.706,00	15.298.950.876,00	2.543.363.170,00
	1.20	Kecamatan Langkapura	8.005.213.748,00	9.721.061.738,00	1.715.847.990,00
VIII		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.230.305.034,00	10.047.408.016,00	1.817.102.982,00
1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.230.305.034,00	10.047.408.016,00	1.817.102.982,00
	1.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.230.305.034,00	10.047.408.016,00	1.817.102.982,00
		JUMLAH	2.364.847.300.275,00	2.936.275.630.045,00	571.428.329.770,00



3.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 maka urusan yang menjadi kewenangan daerah akan dilaksanakan oleh OPD se-Kota Bandar Lampung.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yakni selain untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan (klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - (a) pendidikan,
 - (b) kesehatan,
 - (c) pekerjaan umum dan penataan ruang,
 - (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
 - (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
 - (f) sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - (a) Tenaga kerja,
 - (b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
 - (c) Pangan,
 - (d) Pertanahan,
 - (e) Lingkungan hidup,
 - (f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
 - (g) Pemberdayaan masyarakat,



- (h) Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana,
- (i) Perhubungan,
- (j) Komunikasi dan informatika,
- (k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah,
- (l) Penanaman modal,
- (m) Kepemudaan dan olahraga,
- (n) Statistik,
- (o) Persandian,
- (p) Kebudayaan,
- (q) Perpustakaan, dan
- (r) Kearsipan.

3) Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- (a) Kelautan dan perikanan,
- (b) Pariwisata,
- (c) Pertanian,
- (d) Perdagangan,
- (g) Perindustrian, dan
- (h) Transmigrasi.

4) Unsur pendukung, meliputi:

- (a) Sekretariat Daerah; dan
- (b) Sekretariat DPRD.

5) Unsur penunjang, meliputi:

- (a) Perencanaan;
- (b) Keuangan;
- (c) Kepegawaian;
- (d) Pendidikan dan pelatihan;
- (e) Penelitian dan pengembangan;

6) Unsur pengawas yaitu inspektorat;

7) Unsur kewilayahan, meliputi:

- (a) Kecamatan.

8) Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik.

Berdasarkan urusan pemerintahan baik urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan, serta unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan



umum dan unsur kekhususan tersebut, maka plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan, satuan kerja / OPD dan program / kegiatan / sub kegiatan tahun 2023 secara terinci dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.1-01.2-22.0-00.02. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan	Pagu Indikatif Murni (Rp)	Pagu Indikatif Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.413.253.711.343,00	1.846.868.111.324,00	433.614.399.981,00
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	649.023.517.494,00	714.613.369.498,00	65.589.852.004,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	649.023.517.494,00	714.613.369.498,00	65.589.852.004,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	466.196.722.244,00	504.534.321.408,00	38.337.599.164,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	-
				-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	462.213.883.494,00	499.714.729.734,00	37.500.846.240,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	461.628.433.494,00	499.129.279.734,00	37.500.846.240,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	585.450.000,00	585.450.000,00	-
				-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.690.000,00	293.690.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.000.000,00	58.000.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.000.000,00	11.000.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.440.000,00	52.440.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	8.250.000,00	8.250.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	-
				-
				-
				-

1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.000.000,00	487.400.000,00	392.400.000,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	372.900.000,00	372.900.000,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.000.000,00	114.500.000,00	19.500.000,00
				-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.260.000.000,00	2.610.019.724,00	350.019.724,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	102.019.724,00	2.019.724,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.160.000.000,00	2.508.000.000,00	348.000.000,00
				-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.244.148.750,00	1.338.481.950,00	94.333.200,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.000.000,00	195.323.200,00	25.323.200,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	73.064.000,00	13.064.000,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.550.000,00	11.550.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1.000.000.000,00	1.055.946.000,00	55.946.000,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.598.750,00	2.598.750,00	-
				-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	177.038.737.750,00	204.290.990.590,00	27.252.252.840,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	86.377.284.000,00	100.179.353.160,00	13.802.069.160,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	-	4.680.218.300,00	4.680.218.300,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.06	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	779.642.650,00	779.642.650,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas	6.031.384.000,00	6.773.292.210,00	741.908.210,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	500.000.000,00	696.625.000,00	196.625.000,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.500.000.000,00	8.276.375.000,00	5.776.375.000,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.25	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000,00	300.000.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	125.000.000,00	1.345.000.000,00	1.220.000.000,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	76.770.900.000,00	77.178.200.000,00	407.300.000,00
				-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	70.570.353.750,00	83.885.465.030,00	13.315.111.280,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	4.526.600.000,00	8.988.558.600,00	4.461.958.600,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Sekolah	235.624.000,00	2.274.456.000,00	2.038.832.000,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	1.500.000.000,00	2.982.372.000,00	1.482.372.000,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.500.000.000,00	4.948.625.000,00	2.448.625.000,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.101.863.000,00	4.299.886.680,00	2.198.023.680,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	8.540.166.750,00	9.587.766.750,00	1.047.600.000,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.38	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	400.000.000,00	445.000.000,00	45.000.000,00

1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	125.000.000,00	125.000.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50.441.100.000,00	50.033.800.000,00	(407.300.000,00)
				-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13.757.000.000,00	13.892.072.400,00	135.072.400,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Ruang Kelas Ruang Guru PAUD	-	135.072.400,00	135.072.400,00
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	350.000.000,00	350.000.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	13.407.000.000,00	13.407.000.000,00	-
				-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.334.100.000,00	6.334.100.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal Kesetaraan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal Kesetaraan	5.234.100.000,00	5.234.100.000,00	-
				-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.788.057.500,00	5.788.057.500,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.788.057.500,00	5.788.057.500,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal Kesetaraan	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.01.1-01.2-22.0-00.02.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal Kesetaraan	5.588.057.500,00	5.588.057.500,00	-
				-

Urusan : 1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.1-02.0-00.0-00.01. Dinas Kesehatan

1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	341.959.735.537,00	444.141.230.608,00	102.181.495.071,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	256.711.967.600,00	350.756.536.766,00	94.044.569.166,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	165.822.518.821,73	172.282.762.429,73	6.460.243.608,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.754.723.222,00	80.858.032.030,00	3.103.308.808,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77.538.723.222,00	80.642.032.030,00	3.103.308.808,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	216.000.000,00	216.000.000,00	-
				-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)
				-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.560.763,00	277.560.763,00	25.000.000,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.060.763,00	12.060.763,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	7.500.000,00	7.500.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.000.000,00	8.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	178.018.926,73	178.018.926,73	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.018.926,73	78.018.926,73	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.169.500.000,00	23.467.084.000,00	3.297.584.000,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000,00	188.000.000,00	18.000.000,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.999.500.000,00	23.279.084.000,00	3.279.584.000,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	695.869.910,00	755.220.710,00	59.350.800,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00	-

1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	455.869.910,00	515.220.710,00	59.350.800,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	66.696.846.000,00	66.696.846.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	66.696.846.000,00	66.696.846.000,00	-
				-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	89.935.173.503,27	177.441.169.061,27	87.505.995.558,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	13.003.613.000,00	18.881.569.830,00	5.877.956.830,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.841.850.000,00	3.841.850.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.606.290.000,00	1.606.290.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.521.310.000,00	5.527.062.735,00	2.005.752.735,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.16	Pengadaan Obat Vaksin	3.034.163.000,00	5.877.266.559,00	2.843.103.559,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.000.000.000,00	2.029.100.536,00	1.029.100.536,00
				-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.900.002.369,00	158.528.041.097,00	81.628.038.728,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	429.898.056,00	429.898.056,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	172.422.000,00	172.422.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	206.640.000,00	206.640.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	223.290.000,00	223.290.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	309.884.000,00	309.884.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.130.978.466,00	2.130.978.466,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	67.168.000,00	67.168.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.419.566.000,00	1.419.566.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.074.539.200,00	1.074.539.200,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	85.241.600,00	109.487.600,00	24.246.000,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.694.065.000,00	2.694.065.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	300.000.000,00	300.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan Atau Berpotensi Bencana	750.000.000,00	930.595.000,00	180.595.000,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	337.056.000,00	337.056.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	849.454.000,00	849.454.000,00	-

1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	372.860.000,00	372.860.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	196.000.000,00	196.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.400.000,00	11.400.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	29.318.591.378,00	107.902.211.281,00	78.583.619.903,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	216.760.000,00	216.760.000,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	18.242.514.000,00	18.807.971.825,00	565.457.825,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	15.573.500.000,00	18.417.591.425,00	2.844.091.425,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota	308.064.169,00	308.064.169,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.000.000.000,00	213.268.575,00	(786.731.425,00)
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Malaria	476.870.500,00	476.870.500,00	-
				-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	31.558.134,27	31.558.134,27	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	31.558.134,27	31.558.134,27	-
				-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	232.450.275,00	232.450.275,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
				-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	132.450.275,00	132.450.275,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	132.450.275,00	132.450.275,00	-
				-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN	125.000.000,00	203.330.000,00	78.330.000,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.03	Penerbitan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	125.000.000,00	153.350.000,00	28.350.000,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	125.000.000,00	153.350.000,00	28.350.000,00
				-
				-

1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	49.980.000,00	49.980.000,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	-	49.980.000,00	49.980.000,00
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	596.825.000,00	596.825.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	412.500.000,00	412.500.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	412.500.000,00	412.500.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.02	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.325.000,00	184.325.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	184.325.000,00	184.325.000,00	-
				-

Urusan : 1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.1-02.0-00.0-00.02. Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. DADI TJOKRODIPO

1.02.1-02.0-00.0-00.02	Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. DADI TJOKRODIPO	85.247.767.937,00	93.384.693.842,00	8.136.925.905,00
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.906.926.437,00	26.703.486.921,00	4.796.560.484,00
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.895.300,00	24.181.292,00	(32.714.008,00)
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.895.300,00	24.181.292,00	(32.714.008,00)
				-
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.046.031.137,00	18.201.199.414,00	3.155.168.277,00
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.008.831.137,00	18.171.239.414,00	3.162.408.277,00
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	37.200.000,00	29.960.000,00	(7.240.000,00)
				-
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	162.936.500,00	162.936.500,00
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	162.936.500,00	162.936.500,00
				-
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.804.000.000,00	8.315.169.715,00	1.511.169.715,00
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	924.000.000,00	1.173.869.715,00	249.869.715,00
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.880.000.000,00	7.141.300.000,00	1.261.300.000,00
				-
1.02.1-02.0-00.0-00.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	63.340.841.500,00	66.123.728.246,00	2.782.886.746,00
1.02.1-02.0-00.0-00.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	26.674.104.700,00	29.456.991.446,00	2.782.886.746,00
1.02.1-02.0-00.0-00.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	26.312.200.000,00	26.312.200.000,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat Vaksin	361.904.700,00	3.144.791.446,00	2.782.886.746,00
				-
1.02.1-02.0-00.0-00.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.666.736.800,00	36.666.736.800,00	-
1.02.1-02.0-00.0-00.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	36.666.736.800,00	36.666.736.800,00	-
				-
1.02.1-02.0-00.0-00.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	-	557.478.675,00	557.478.675,00
1.02.1-02.0-00.0-00.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	557.478.675,00	557.478.675,00
1.02.1-02.0-00.0-00.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	-	557.478.675,00	557.478.675,00
				-

Urusan : 1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1-03.0-00.0-00.01. Dinas Pekerjaan Umum

1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	341.916.611.613,00	591.862.144.055,00	249.945.532.442,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum	339.614.451.613,00	587.880.050.255,00	248.265.598.642,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.381.468.736,00	109.908.323.186,00	22.526.854.450,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.000.000,00	387.768.700,00	197.768.700,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	190.000.000,00	387.768.700,00	197.768.700,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.836.211.613,00	7.585.816.524,00	749.604.911,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.518.451.613,00	7.268.056.524,00	749.604.911,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	251.760.000,00	251.760.000,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	66.000.000,00	66.000.000,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	698.301.773,00	698.301.773,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	273.763.806,00	273.763.806,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150.137.967,00	150.137.967,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.500.000,00	42.500.000,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.300.000,00	56.300.000,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	15.600.000,00	15.600.000,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	20.000.000,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.670.350.000,00	99.125.114.839,00	21.454.764.839,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	74.020.000.000,00	94.918.764.839,00	20.898.764.839,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.650.350.000,00	4.206.350.000,00	556.000.000,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.916.605.350,00	2.041.321.350,00	124.716.000,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.100.000,00	70.460.000,00	3.360.000,00

1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.811.005.350,00	1.932.361.350,00	121.356.000,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.500.000,00	38.500.000,00	-
				-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.200.000.000,00	16.685.234.980,00	8.485.234.980,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	8.200.000.000,00	16.685.234.980,00	8.485.234.980,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.02.2.01.46	Normalisasi Restorasi Sungai	8.000.000.000,00	16.485.234.980,00	8.485.234.980,00
				-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.000.000.000,00	8.215.531.690,00	3.215.531.690,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di	5.000.000.000,00	8.215.531.690,00	3.215.531.690,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5.000.000.000,00	8.215.531.690,00	3.215.531.690,00
				-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.700.000.000,00	5.529.223.350,00	2.829.223.350,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.700.000.000,00	5.529.223.350,00	2.829.223.350,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.05.2.01.12	Pembangunan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.500.000.000,00	5.329.223.350,00	2.829.223.350,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.05.2.01.16	Rehabilitasi Peningkatan Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	200.000.000,00	200.000.000,00	-
				-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	15.500.000.000,00	28.653.175.815,00	13.153.175.815,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.500.000.000,00	28.653.175.815,00	13.153.175.815,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000.000,00	19.738.078.815,00	9.738.078.815,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	5.500.000.000,00	8.915.097.000,00	3.415.097.000,00
				-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	77.283.277.513,00	137.079.952.838,00	59.796.675.325,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	77.283.277.513,00	137.079.952.838,00	59.796.675.325,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota	77.283.277.513,00	137.079.952.838,00	59.796.675.325,00
				-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	99.346.923.766,00	183.410.269.638,00	84.063.345.872,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	99.346.923.766,00	183.410.269.638,00	84.063.345.872,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.08.2.01.02	Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	99.346.923.766,00	183.410.269.638,00	84.063.345.872,00
				-
				-

1.03.1-03.0-00.0-00.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	42.702.781.598,00	96.898.338.758,00	54.195.557.160,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	42.702.781.598,00	96.898.338.758,00	54.195.557.160,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	11.639.344.308,00	46.144.140.118,00	34.504.795.810,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	15.000.000.000,00	23.525.649.400,00	8.525.649.400,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	13.063.437.290,00	20.242.395.540,00	7.178.958.250,00
1.03.1-03.0-00.0-00.01.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin jembatan	3.000.000.000,00	6.986.153.700,00	3.986.153.700,00
				-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	777.000.000,00	777.000.000,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	777.000.000,00	777.000.000,00	-
				-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan	723.000.000,00	723.000.000,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.11.2.04.02	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib	350.000.000,00	350.000.000,00	-
1.03.1-03.0-00.0-00.01.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib	373.000.000,00	373.000.000,00	-
				-

Urusan : 1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1-04.0-00.0-00.01. Dinas Perumahan dan Permukiman

1.03.1-04.0-00.0-00.01	Dinas Perumahan dan Permukiman	2.302.160.000,00	3.982.093.800,00	1.679.933.800,00
1.03.1-04.0-00.0-00.01.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	442.160.000,00	647.910.000,00	205.750.000,00
1.03.1-04.0-00.0-00.01.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	442.160.000,00	647.910.000,00	205.750.000,00
1.03.1-04.0-00.0-00.01.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	442.160.000,00	647.910.000,00	205.750.000,00
				-
1.03.1-04.0-00.0-00.01.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	160.000.000,00	271.164.000,00	111.164.000,00
1.03.1-04.0-00.0-00.01.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000,00	271.164.000,00	111.164.000,00
1.03.1-04.0-00.0-00.01.09.2.01.06	Monitoring Penataan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	160.000.000,00	271.164.000,00	111.164.000,00
				-
1.03.1-04.0-00.0-00.01.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.700.000.000,00	3.063.019.800,00	1.363.019.800,00
1.03.1-04.0-00.0-00.01.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	1.450.000.000,00	2.813.019.800,00	1.363.019.800,00
1.03.1-04.0-00.0-00.01.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten Kota	1.400.000.000,00	2.487.921.800,00	1.087.921.800,00
1.03.1-04.0-00.0-00.01.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	50.000.000,00	172.400.000,00	122.400.000,00
1.03.1-04.0-00.0-00.01.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang Penataan Ruang	-	152.698.000,00	152.698.000,00
				-
1.03.1-04.0-00.0-00.01.12.2.03	Koordinasi dan Sinronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	-
1.03.1-04.0-00.0-00.01.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	250.000.000,00	250.000.000,00	-
				-

Urusan : 1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.1-03.0-00.0-00.01. Dinas Pekerjaan Umum

1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.743.017.285,00	5.562.547.155,00	819.529.870,00
1.04.1-03.0-00.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum	360.000.000,00	360.000.000,00	-
1.04.1-03.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	360.000.000,00	360.000.000,00	-
1.04.1-03.0-00.0-00.01.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	360.000.000,00	360.000.000,00	-
1.04.1-03.0-00.0-00.01.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus	360.000.000,00	360.000.000,00	-
				-

Urusan : 1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.1-04.0-00.0-00.01. Dinas Perumahan dan Permukiman

1.04.1-04.0-00.0-00.01	Dinas Perumahan dan Permukiman	4.383.017.285,00	5.202.547.155,00	819.529.870,00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.283.017.285,00	5.012.747.155,00	729.729.870,00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	-
				-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.497.217.285,00	3.938.947.155,00	441.729.870,00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.325.177.285,00	3.753.107.155,00	427.929.870,00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	172.040.000,00	185.840.000,00	13.800.000,00
				-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000,00	-
				-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.800.000,00	255.800.000,00	-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	10.800.000,00	10.800.000,00	-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.000.000,00	135.000.000,00	-
				-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	198.000.000,00	198.000.000,00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	64.000.000,00	64.000.000,00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	134.000.000,00	134.000.000,00
				-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.000.000,00	500.000.000,00	90.000.000,00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.000.000,00	450.000.000,00	90.000.000,00
				-

1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000,00	35.000.000,00	-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
				-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	50.000.000,00	50.000.000,00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	-	50.000.000,00	50.000.000,00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	-	50.000.000,00	50.000.000,00
				-
1.04.1-04.0-00.0-00.01.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000,00	139.800.000,00	39.800.000,00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100.000.000,00	139.800.000,00	39.800.000,00
1.04.1-04.0-00.0-00.01.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran Peremajaan Permukiman Kumuh	100.000.000,00	139.800.000,00	39.800.000,00
				-

Urusan : 1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.1-05.0-00.0-00.01. Satuan Polisi Pamong Praja

1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	58.080.652.430,00	70.298.268.698,00	12.217.616.268,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01	Satuan Polisi Pamong Praja	37.502.444.808,00	44.399.384.068,00	6.896.939.260,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.277.444.808,00	44.113.434.068,00	6.835.989.260,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.513.044.808,00	7.206.578.087,00	693.533.279,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.384.444.808,00	7.091.978.087,00	707.533.279,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	128.600.000,00	114.600.000,00	(14.000.000,00)
				-
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	925.300.000,00	825.300.000,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	825.300.000,00	825.300.000,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	100.000.000,00	-
				-
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.500.000,00	221.213.880,00	151.713.880,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00	23.406.620,00	22.906.620,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.200.000,00	28.858.160,00	(7.341.840,00)
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00	3.949.100,00	2.949.100,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	50.000.000,00	50.000.000,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000,00	100.000.000,00	85.000.000,00
				-
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	751.500.000,00	1.209.511.945,00	458.011.945,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	751.500.000,00	751.500.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	99.968.745,00	99.968.745,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	329.623.200,00	329.623.200,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	-	28.420.000,00	28.420.000,00
				-
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.994.500.000,00	33.891.715.000,00	4.897.215.000,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.984.500.000,00	33.886.715.000,00	4.902.215.000,00
				-

1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	833.900.000,00	644.115.156,00	(189.784.844,00)
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.532.088,00	33.532.088,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	800.367.912,00	575.583.068,00	(224.784.844,00)
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	-	35.000.000,00	35.000.000,00
				-
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	225.000.000,00	285.950.000,00	60.950.000,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	155.000.000,00	210.000.000,00	55.000.000,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	20.000.000,00	20.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan	30.000.000,00	30.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
				-
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	70.000.000,00	75.950.000,00	5.950.000,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan	30.000.000,00	35.950.000,00	5.950.000,00
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan	40.000.000,00	40.000.000,00	-
				-

Urusan : 1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.1-05.0-00.0-00.04. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.05.1-05.0-00.0-00.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.883.274.990,00	14.670.663.590,00	3.787.388.600,00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.683.274.990,00	14.470.663.590,00	3.787.388.600,00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.000.114.990,00	6.615.352.590,00	615.237.600,00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.685.274.990,00	6.300.512.590,00	615.237.600,00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	314.840.000,00	314.840.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148.000.000,00	148.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	138.000.000,00	138.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.692.873,00	228.692.873,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.309.516,00	28.309.516,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.178.357,00	3.178.357,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.120.000,00	111.120.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.485.000,00	16.485.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	60.000.000,00	-
				-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	684.900.000,00	698.670.000,00	13.770.000,00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000.000,00	600.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.400.000,00	13.400.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	71.500.000,00	85.270.000,00	13.770.000,00
				-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.030.600.000,00	6.058.400.000,00	3.027.800.000,00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	117.000.000,00	117.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.913.600.000,00	5.941.400.000,00	3.027.800.000,00
				-

1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	590.967.127,00	721.548.127,00	130.581.000,00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.000.000,00	55.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	487.500.000,00	618.081.000,00	130.581.000,00
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.250.000,00	11.250.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.217.127,00	37.217.127,00	-
				-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.04.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
				-

Urusan : 1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.1-05.0-00.0-00.06. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

1.05.1-05.0-00.0-00.06	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.694.932.632,00	11.228.221.040,00	1.533.288.408,00
1.05.1-05.0-00.0-00.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.594.932.632,00	11.128.221.040,00	1.533.288.408,00
1.05.1-05.0-00.0-00.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.930.377.632,00	3.380.066.040,00	449.688.408,00
1.05.1-05.0-00.0-00.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.744.932.632,00	3.194.621.040,00	449.688.408,00
1.05.1-05.0-00.0-00.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	185.445.000,00	185.445.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.055.000,00	175.055.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.570.000,00	32.570.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92.485.000,00	92.485.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	256.700.000,00	256.700.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.500.000,00	17.500.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	89.200.000,00	89.200.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.103.800.000,00	6.187.400.000,00	1.083.600.000,00
1.05.1-05.0-00.0-00.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	82.000.000,00	82.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.021.800.000,00	6.105.400.000,00	1.083.600.000,00
1.05.1-05.0-00.0-00.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.129.000.000,00	1.129.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.079.000.000,00	1.079.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.06.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.06.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.05.1-05.0-00.0-00.06.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	-
				-

Urusan : 1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.1-06.0-00.0-00.01. Dinas Sosial

1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	17.530.176.984,00	20.390.551.310,00	2.860.374.326,00
1.06.1-06.0-00.0-00.01	Dinas Sosial	17.530.176.984,00	20.390.551.310,00	2.860.374.326,00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.808.980.259,00	4.269.104.585,00	460.124.326,00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.762.558,00	18.762.558,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.762.558,00	18.762.558,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.991.076.858,00	3.386.451.184,00	395.374.326,00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.896.876.858,00	3.292.251.184,00	395.374.326,00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	94.200.000,00	94.200.000,00	-
				-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	5.000.000,00	-
				-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.600.000,00	155.265.160,00	3.665.160,00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.400.000,00	41.400.000,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.025.000,00	6.025.000,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.200.000,00	14.865.160,00	3.665.160,00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.975.000,00	3.975.000,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000,00	65.000.000,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-
				-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.576.666,00	394.576.666,00	40.000.000,00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	90.576.666,00	90.576.666,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	264.000.000,00	304.000.000,00	40.000.000,00
				-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.964.177,00	259.049.017,00	21.084.840,00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.032.089,00	51.116.929,00	16.084.840,00

1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.932.088,00	35.932.088,00	5.000.000,00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000,00	22.000.000,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	-
				-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	6.665.000.000,00	9.065.250.000,00	2.400.250.000,00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	6.665.000.000,00	9.065.250.000,00	2.400.250.000,00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	80.000.000,00	80.000.000,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	6.285.000.000,00	8.685.250.000,00	2.400.250.000,00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga	300.000.000,00	300.000.000,00	-
				-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	448.812.114,00	448.812.114,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	334.812.114,00	334.812.114,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Penyediaan Perumahan	60.650.126,00	60.650.126,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	60.000.000,00	60.000.000,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	214.161.988,00	214.161.988,00	-
				-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	114.000.000,00	114.000.000,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah	20.000.000,00	20.000.000,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	94.000.000,00	94.000.000,00	-
				-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.530.000.000,00	6.352.138.855,00	4.822.138.855,00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.530.000.000,00	6.352.138.855,00	4.822.138.855,00
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	450.000.000,00	450.000.000,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	-	4.822.138.855,00	4.822.138.855,00
				-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	5.077.384.611,00	255.245.756,00	(4.822.138.855,00)
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	5.077.384.611,00	255.245.756,00	(4.822.138.855,00)
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	5.000.000.000,00	177.861.145,00	(4.822.138.855,00)
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.2.01.02	Penyediaan sandang	27.718.438,00	27.718.438,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.2.01.03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	31.396.418,00	31.396.418,00	-
1.06.1-06.0-00.0-00.01.06.2.01.05	Pelayanan dukungan psikososial	18.269.755,00	18.269.755,00	-
				-

Urusan : 2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.2-07.0-00.0-00.01. Dinas Tenaga Kerja

2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	190.118.404.599,00	218.225.141.110,00	28.106.736.511,00
2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.517.278.944,00	5.991.717.463,00	474.438.519,00
2.07.2-07.0-00.0-00.01	Dinas Tenaga Kerja	5.517.278.944,00	5.991.717.463,00	474.438.519,00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.481.054.360,00	4.955.492.879,00	474.438.519,00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	27.000.000,00	27.000.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.211.848.375,00	3.620.086.894,00	408.238.519,00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.053.053.555,00	3.444.792.074,00	391.738.519,00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	124.794.820,00	141.294.820,00	16.500.000,00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34.000.000,00	34.000.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	175.000.000,00	175.000.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	175.000.000,00	175.000.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.000.000,00	65.000.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.414.575,00	227.414.575,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	7.101.400,00	7.101.400,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.238.132,00	48.238.132,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.992.401,00	9.992.401,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.550.000,00	11.550.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.714.338,00	56.714.338,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	4.860.000,00	4.860.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.958.304,00	15.958.304,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.000.000,00	73.000.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	280.541.410,00	280.541.410,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	98.707.658,00	98.707.658,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	171.833.752,00	171.833.752,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	-

2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.600.000,00	422.600.000,00	56.000.000,00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	30.600.000,00	30.600.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.000.000,00	392.000.000,00	56.000.000,00
				-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.650.000,00	137.850.000,00	10.200.000,00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.600.000,00	30.600.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.050.000,00	96.250.000,00	10.200.000,00
2.07.2-07.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	-
				-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	80.000.000,00	80.000.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	80.000.000,00	80.000.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	80.000.000,00	80.000.000,00	-
				-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	373.658.034,00	373.658.034,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	297.420.000,00	297.420.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	187.420.000,00	187.420.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	110.000.000,00	110.000.000,00	-
				-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	36.238.034,00	36.238.034,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	36.238.034,00	36.238.034,00	-
				-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	40.000.000,00	40.000.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	40.000.000,00	40.000.000,00	-
				-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	215.000.000,00	215.000.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000,00	140.000.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	75.000.000,00	75.000.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	65.000.000,00	65.000.000,00	-
				-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia PMI Pekerja Migran Indonesia PMI	75.000.000,00	75.000.000,00	-
				-

2.07.2-07.0-00.0-00.01.05	Program Hubungan Industrial	367.566.550,00	367.566.550,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	367.566.550,00	367.566.550,00	-
2.07.2-07.0-00.0-00.01.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	367.566.550,00	367.566.550,00	-
				-

Urusan : 2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2.08.2-08.0-00.0-00.01. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.963.604.183,00	6.633.792.674,00	1.670.188.491,00
2.08.2-08.0-00.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	4.963.604.183,00	6.633.792.674,00	1.670.188.491,00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.639.804.183,00	4.049.992.674,00	410.188.491,00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.125.000,00	48.125.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.125.000,00	48.125.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.101.668.788,00	3.471.857.279,00	370.188.491,00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.904.804.183,00	3.274.992.674,00	370.188.491,00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	168.199.605,00	168.199.605,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.665.000,00	28.665.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	30.000.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.241.360,00	126.241.360,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	3.656.800,00	3.656.800,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.465.000,00	23.465.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.955.560,00	6.955.560,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.975.000,00	3.975.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.289.000,00	22.289.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	3.900.000,00	3.900.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.246.227,00	73.246.227,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.025.000,00	33.025.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.221.227,00	40.221.227,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.700.000,00	198.700.000,00	40.000.000,00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	13.500.000,00	13.500.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.200.000,00	185.200.000,00	40.000.000,00

2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.822.808,00	101.822.808,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.674.662,00	36.674.662,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.256.000,00	49.256.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.892.146,00	15.892.146,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	390.000.000,00	390.000.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	60.000.000,00	60.000.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	330.000.000,00	330.000.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	330.000.000,00	330.000.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	294.454.000,00	294.454.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	109.700.000,00	109.700.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	109.700.000,00	109.700.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	109.754.000,00	109.754.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota (DAK)	109.754.000,00	109.754.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	190.000.000,00	1.450.000.000,00	1.260.000.000,00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190.000.000,00	1.450.000.000,00	1.260.000.000,00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kg dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	35.000.000,00	35.000.000,00	-

2.08.2-08.0-00.0-00.01.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	155.000.000,00	1.415.000.000,00	1.260.000.000,00
2.08.2-08.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	40.000.000,00	40.000.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	40.000.000,00	40.000.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	85.000.000,00	85.000.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	85.000.000,00	85.000.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota	85.000.000,00	85.000.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	324.346.000,00	324.346.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	249.750.000,00	249.750.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab Kota DAK	144.750.000,00	144.750.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	105.000.000,00	105.000.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.596.000,00	74.596.000,00	-
2.08.2-08.0-00.0-00.01.07.2.03.02	Kordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Kota	74.596.000,00	74.596.000,00	-
				-

Urusan : 2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : 2.09.2-09.0-00.0-00.01. Dinas Pangan

2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.984.038.259,00	5.973.419.763,00	(2.010.618.496,00)
2.09.2-09.0-00.0-00.01	Dinas Pangan	7.984.038.259,00	5.973.419.763,00	(2.010.618.496,00)
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.003.578.147,00	4.481.608.251,00	478.030.104,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.149.558.259,00	3.579.588.363,00	430.030.104,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.036.038.259,00	3.466.068.363,00	430.030.104,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	98.520.000,00	98.520.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.840.000,00	67.840.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.840.000,00	52.840.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.957.150,00	142.957.150,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.332.150,00	22.332.150,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.500.000,00	2.500.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	13.125.000,00	13.125.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	60.000.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.387.905,00	134.387.905,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	59.387.905,00	59.387.905,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.000.000,00	348.000.000,00	48.000.000,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.000.000,00	336.000.000,00	48.000.000,00

2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.834.833,00	148.834.833,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.465.705,00	33.465.705,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.369.128,00	115.369.128,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.617.137.050,00	1.128.488.450,00	(2.488.648.600,00)
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	327.137.050,00	327.137.050,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	48.532.050,00	48.532.050,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	133.957.000,00	133.957.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.01.04	Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	144.648.000,00	144.648.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	3.000.000.000,00	500.000.000,00	(2.500.000.000,00)
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota	3.000.000.000,00	500.000.000,00	(2.500.000.000,00)
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	290.000.000,00	301.351.400,00	11.351.400,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	60.000.000,00	60.000.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	230.000.000,00	241.351.400,00	11.351.400,00
2.09.2-09.0-00.0-00.01.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	162.622.500,00	162.622.500,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	54.022.500,00	54.022.500,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	54.022.500,00	54.022.500,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	108.600.000,00	108.600.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Kota	108.600.000,00	108.600.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	200.700.562,00	200.700.562,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	200.700.562,00	200.700.562,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kota	100.175.000,00	100.175.000,00	-
2.09.2-09.0-00.0-00.01.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten Kota	100.525.562,00	100.525.562,00	-

Urusan : 2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.2-11.0-00.0-00.01. Dinas Lingkungan Hidup

2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	65.936.169.557,00	72.770.844.995,00	6.834.675.438,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01	Dinas Lingkungan Hidup	65.936.169.557,00	72.770.844.995,00	6.834.675.438,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.015.560.171,00	59.860.081.609,00	8.844.521.438,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	137.250.000,00	(12.750.000,00)
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000,00	75.400.000,00	400.000,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000,00	61.850.000,00	(13.150.000,00)
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.259.369.557,00	18.844.209.157,00	1.584.839.600,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.014.169.557,00	18.599.009.157,00	1.584.839.600,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	220.200.000,00	220.200.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran	25.000.000,00	25.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,00	20.000.000,00	(55.000.000,00)
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	75.000.000,00	20.000.000,00	(55.000.000,00)
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	555.510.000,00	620.115.200,00	64.605.200,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	20.010.000,00	20.010.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	142.500.000,00	142.500.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	110.000.000,00	174.605.200,00	64.605.200,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	18.000.000,00	18.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	331.846.814,00	331.846.814,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	201.846.814,00	201.846.814,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	130.000.000,00	130.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.001.700.000,00	26.653.624.338,00	3.651.924.338,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	384.100.000,00	302.924.338,00	(81.175.662,00)
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.617.600.000,00	26.350.700.000,00	3.733.100.000,00

2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.642.133.800,00	13.253.036.100,00	3.610.902.300,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.400.000,00	73.588.000,00	25.188.000,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.896.450.000,00	12.372.231.600,00	3.475.781.600,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	697.283.800,00	807.216.500,00	109.932.700,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.02.2.02	Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kab/Kota	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	700.000.000,00	700.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD RPJMD	300.000.000,00	300.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	650.000.000,00	650.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	550.000.000,00	550.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	300.000.000,00	300.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	506.125.000,00	640.279.000,00	134.154.000,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	506.125.000,00	640.279.000,00	134.154.000,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	125.000.000,00	125.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	381.125.000,00	515.279.000,00	134.154.000,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.06.2.01.03	Pengawasan terhadap usaha dan atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	-

2.11.2-11.0-00.0-00.01.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat Lembaga Masyarakat Dunia Usaha Dunia Pendidikan Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	12.514.484.386,00	10.370.484.386,00	(2.144.000.000,00)
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01	Pengelolaan Sampah	12.514.484.386,00	10.370.484.386,00	(2.144.000.000,00)
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	200.000.000,00	200.000.000,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA TPST SPA Kabupaten Kota	100.000.000,00	160.000.000,00	60.000.000,00
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	282.996.950,00	282.996.950,00	-
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA TPST SPA Kabupaten Kota	11.931.487.436,00	9.727.487.436,00	(2.204.000.000,00)
				-

Urusan : 2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Organisasi : 2.12.2-12.0-00.0-00.01. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.181.417.299,00	11.983.883.326,00	2.802.466.027,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.181.417.299,00	11.983.883.326,00	2.802.466.027,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.693.935.969,00	10.478.801.996,00	2.784.866.027,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.000.000,00	72.400.000,00	41.400.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.000.000,00	31.000.000,00	-
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	41.400.000,00	41.400.000,00
				-
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.812.812.299,00	5.726.580.499,00	913.768.200,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.633.417.299,00	5.531.285.499,00	897.868.200,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	179.395.000,00	195.295.000,00	15.900.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	669.224.770,00	1.554.628.597,00	885.403.827,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	14.700.000,00	14.700.000,00	-
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.929.746,00	984.435.971,00	794.506.225,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.000.000,00	23.000.000,00	-
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.000.000,00	4.005.000,00	5.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	195.763.024,00	228.313.024,00	32.550.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	16.000.000,00	16.000.000,00	-
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.886.000,00	247.233.602,00	58.347.602,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.946.000,00	30.941.000,00	(5.000,00)
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	339.750.000,00	1.020.084.000,00	680.334.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	51.750.000,00	134.700.000,00	82.950.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.000.000,00	711.259.000,00	449.259.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.000.000,00	174.125.000,00	148.125.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.626.840.000,00	1.862.800.000,00	235.960.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	24.840.000,00	28.800.000,00	3.960.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.602.000.000,00	1.834.000.000,00	232.000.000,00

2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.308.900,00	242.308.900,00	28.000.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.052.950,00	40.052.950,00	-
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.055.950,00	67.055.950,00	-
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.200.000,00	107.200.000,00	28.000.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000,00	28.000.000,00	-
2.12.2-12.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	781.871.705,00	781.871.705,00	-
2.12.2-12.0-00.0-00.01.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	661.871.705,00	661.871.705,00	-
2.12.2-12.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP El Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan DAK	661.871.705,00	661.871.705,00	-
				-
2.12.2-12.0-00.0-00.01.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	120.000.000,00	120.000.000,00	-
2.12.2-12.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (DAK)	120.000.000,00	120.000.000,00	-
2.12.2-12.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	107.600.000,00	107.600.000,00	-
2.12.2-12.0-00.0-00.01.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	107.600.000,00	107.600.000,00	-
2.12.2-12.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	107.600.000,00	107.600.000,00	-
				-
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	598.009.625,00	615.609.625,00	17.600.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	598.009.625,00	615.609.625,00	17.600.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	150.000.000,00	167.600.000,00	17.600.000,00
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	79.000.000,00	79.000.000,00	-
2.12.2-12.0-00.0-00.01.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	369.009.625,00	369.009.625,00	-
				-

Urusan : 2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2-13.0-00.0-00.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat

2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.719.723.875,00	4.082.942.834,00	363.218.959,00
2.13.2-13.0-00.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	3.719.723.875,00	4.082.942.834,00	363.218.959,00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.609.359.204,00	2.961.328.163,00	351.968.959,00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.783.740,00	18.783.740,00	-
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.848.990,00	4.848.990,00	-
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.934.750,00	13.934.750,00	-
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.243.877.125,00	2.555.846.084,00	311.968.959,00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.147.723.875,00	2.446.332.834,00	298.608.959,00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	91.080.000,00	104.440.000,00	13.360.000,00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.073.250,00	5.073.250,00	-
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.432.019,48	113.405.728,48	25.973.709,00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.953.344,00	53.207.053,00	24.253.709,00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	-
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.891.570,00	14.891.570,00	-
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	3.000.000,00	3.600.000,00	600.000,00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.587.105,48	20.707.105,48	1.120.000,00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.750.000,00	60.000.000,00	13.250.000,00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	16.750.000,00	-	(16.750.000,00)
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.000.000,00	90.000.000,00	18.000.000,00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000,00	90.000.000,00	18.000.000,00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.516.319,52	113.292.610,52	(17.223.709,00)
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.389.319,52	41.315.098,52	(6.074.221,00)
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.117.000,00	59.967.512,00	(11.149.488,00)

2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.010.000,00	12.010.000,00	-
				-
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	215.766.256,00	227.016.256,00	11.250.000,00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	215.766.256,00	227.016.256,00	11.250.000,00
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	104.189.818,00	104.189.818,00	-
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	111.576.438,00	122.826.438,00	11.250.000,00
				-
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	894.598.415,00	894.598.415,00	-
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	894.598.415,00	894.598.415,00	-
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	129.531.386,00	129.531.386,00	-
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	62.429.616,00	62.429.616,00	-
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	47.492.013,00	47.492.013,00	-
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan	301.252.925,00	301.252.925,00	-
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	353.892.475,00	353.892.475,00	-
				-

Urusan : 2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : 2.14.2-14.0-00.0-00.01. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	25.996.810.527,00	32.169.061.466,00	6.172.250.939,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.996.810.527,00	32.169.061.466,00	6.172.250.939,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.451.736.829,00	5.085.358.268,00	633.621.439,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.500.000,00	27.500.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.500.000,00	27.500.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.792.130.225,00	3.180.691.364,00	388.561.139,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.601.729.527,00	2.972.990.666,00	371.261.139,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	182.951.000,00	200.251.000,00	17.300.000,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.449.698,00	7.449.698,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	384.476.604,00	384.476.604,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	4.880.000,00	4.880.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.476.000,00	54.476.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	195.170.000,00	195.170.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.350.604,00	96.350.604,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.000.000,00	166.218.800,00	93.218.800,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.000.000,00	166.218.800,00	93.218.800,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	762.000.000,00	858.000.000,00	96.000.000,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	186.000.000,00	186.000.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	576.000.000,00	672.000.000,00	96.000.000,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.630.000,00	453.471.500,00	55.841.500,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00	-

2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.150.000,00	123.150.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.650.000,00	12.650.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	231.830.000,00	287.671.500,00	55.841.500,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	70.000.000,00	70.000.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	70.000.000,00	70.000.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	-
				-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9.781.144.198,00	11.020.513.698,00	1.239.369.500,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	102.880.698,00	200.880.698,00	98.000.000,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	82.880.698,00	45.880.698,00	(37.000.000,00)
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.01.04	Promosi dan KIE program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Ruang Elektronik serta Media Luar	-	135.000.000,00	135.000.000,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	7.490.061.500,00	8.577.561.500,00	1.087.500.000,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB PLKB (DAK NON FISIK)	345.150.000,00	345.150.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB PLKB	248.929.000,00	248.929.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	6.895.982.500,00	7.983.482.500,00	1.087.500.000,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	1.161.902.000,00	1.005.352.000,00	(156.550.000,00)
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	300.000.000,00	143.450.000,00	(156.550.000,00)
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	747.902.000,00	747.902.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	114.000.000,00	114.000.000,00	-
				-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.026.300.000,00	1.236.719.500,00	210.419.500,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	396.500.000,00	396.500.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	629.800.000,00	629.800.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	-	210.419.500,00	210.419.500,00
				-

2.14.2-14.0-00.0-00.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	11.693.929.500,00	15.993.189.500,00	4.299.260.000,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11.668.929.500,00	12.534.059.500,00	865.130.000,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita BKB Bina Keluarga Remaja BKR Pusat Informasi dan Koseling Remaja PIK R Bina Keluarga Lansia BKL Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	5.644.379.500,00	6.200.174.500,00	555.795.000,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PIK R dan UPKKS)	718.750.000,00	950.840.000,00	232.090.000,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB BKR BKL PPPKS PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS (DAK NON FISIK)	5.290.800.000,00	5.290.800.000,00	-
2.14.2-14.0-00.0-00.01.04.2.01.14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-	77.245.000,00	77.245.000,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	25.000.000,00	3.459.130.000,00	3.434.130.000,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.04.2.02.03	Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB BKR BKL PPPKS PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS	25.000.000,00	1.115.040.000,00	1.090.040.000,00
2.14.2-14.0-00.0-00.01.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi	-	2.344.090.000,00	2.344.090.000,00
				-

Urusan : 2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.2-15.0-00.0-00.01. Dinas Perhubungan

2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	23.354.774.956,00	26.479.685.742,00	3.124.910.786,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	23.354.774.956,00	26.479.685.742,00	3.124.910.786,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.327.559.856,00	22.857.092.092,00	2.529.532.236,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.500,00	36.000.500,00	12.000.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.000.500,00	36.000.500,00	12.000.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.651.184.956,00	12.841.129.355,00	1.189.944.399,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.352.774.956,00	12.536.509.355,00	1.183.734.399,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	298.410.000,00	304.620.000,00	6.210.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.999.500,00	63.067.476,00	21.067.976,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	-
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.999.500,00	5.999.500,00	-
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	21.067.976,00	21.067.976,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	122.841.200,00	(27.158.800,00)
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	122.841.200,00	(27.158.800,00)
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.107.800.000,00	9.414.319.861,00	1.306.519.861,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	355.800.000,00	374.319.861,00	18.519.861,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.752.000.000,00	9.040.000.000,00	1.288.000.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.574.900,00	379.733.700,00	27.158.800,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.000.000,00	52.000.000,00	-
2.15.2-15.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.574.900,00	327.733.700,00	27.158.800,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	2.792.015.100,00	3.343.343.650,00	551.328.550,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.600.000.000,00	2.129.128.550,00	529.128.550,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	-	29.128.550,00	29.128.550,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota	1.600.000.000,00	2.100.000.000,00	500.000.000,00

2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	819.015.100,00	841.215.100,00	22.200.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota	819.015.100,00	819.015.100,00	-
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	-	22.200.000,00	22.200.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	373.000.000,00	373.000.000,00	-
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	350.000.000,00	350.000.000,00	-
2.15.2-15.0-00.0-00.01.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	23.000.000,00	23.000.000,00	-
2.15.2-15.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	235.200.000,00	279.250.000,00	44.050.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.05.2.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Dalam 1 (Satu) Daerah	-	29.200.000,00	29.200.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.05.2.03.01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Kabupaten Kota	-	29.200.000,00	29.200.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.05.2.05	Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya	235.200.000,00	250.050.000,00	14.850.000,00
2.15.2-15.0-00.0-00.01.05.2.05.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	235.200.000,00	250.050.000,00	14.850.000,00
				-

Urusan : 2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2-16.0-00.0-00.01. Dinas Komunikasi dan Informatika

2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.205.019.593,00	13.786.780.957,00	4.581.761.364,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.205.019.593,00	13.786.780.957,00	4.581.761.364,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.516.174.593,00	5.350.308.966,00	834.134.373,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.850.000,00	19.850.000,00	-
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.925.000,00	9.925.000,00	-
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.925.000,00	9.925.000,00	-
				-
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.598.824.593,00	4.067.096.466,00	468.271.873,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.475.174.593,00	3.916.746.466,00	441.571.873,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	111.000.000,00	137.700.000,00	26.700.000,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.650.000,00	12.650.000,00	-
				-
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00
				-
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.000.000,00	198.262.500,00	58.262.500,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	50.262.500,00	20.262.500,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000,00	85.000.000,00	20.000.000,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	123.000.000,00	123.000.000,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	123.000.000,00	123.000.000,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	698.000.000,00	830.000.000,00	132.000.000,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	696.000.000,00	828.000.000,00	132.000.000,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.500.000,00	77.100.000,00	27.600.000,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.400.000,00	34.200.000,00	4.800.000,00

2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.600.000,00	34.400.000,00	16.800.000,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	8.500.000,00	6.000.000,00
				-
2.16.2-16.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.880.845.000,00	6.052.745.000,00	3.171.900.000,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.880.845.000,00	6.052.745.000,00	3.171.900.000,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	1.248.500.000,00	2.066.500.000,00	818.000.000,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	47.000.000,00	47.000.000,00	-
2.16.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	1.585.345.000,00	3.939.245.000,00	2.353.900.000,00
				-
2.16.2-16.0-00.0-00.01.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.808.000.000,00	2.383.726.991,00	575.726.991,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.525.032.989,00	1.536.856.378,00	11.823.389,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.525.032.989,00	1.536.856.378,00	11.823.389,00
				-
2.16.2-16.0-00.0-00.01.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	282.967.011,00	846.870.613,00	563.903.602,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam Penyelenggaraan	160.000.000,00	220.153.602,00	60.153.602,00
2.16.2-16.0-00.0-00.01.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	122.967.011,00	626.717.011,00	503.750.000,00
				-

Urusan : 2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.2-17.0-00.0-00.01. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.213.045.961,00	5.795.016.042,00	581.970.081,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.213.045.961,00	5.795.016.042,00	581.970.081,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.168.972.211,00	3.564.382.292,00	395.410.081,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.000.000,00	66.000.000,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.000.000,00	66.000.000,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.390.875.961,00	2.719.726.042,00	328.850.081,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.291.875.961,00	2.592.366.042,00	300.490.081,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	99.000.000,00	127.360.000,00	28.360.000,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.036.928,00	172.036.928,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.636.928,00	25.636.928,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	27.000.000,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	5.400.000,00	5.400.000,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	362.000.000,00	418.000.000,00	56.000.000,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	26.000.000,00	26.000.000,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.000.000,00	392.000.000,00	56.000.000,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.059.322,00	88.619.322,00	10.560.000,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.532.088,00	33.532.088,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.527.234,00	50.087.234,00	10.560.000,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-

				-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	12.960.000,00	12.960.000,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan	-	12.960.000,00	12.960.000,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang Undangan	-	12.960.000,00	12.960.000,00
				-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	75.000.000,00	75.000.000,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP USP Koperasi Kewenangan Kabupaten	75.000.000,00	75.000.000,00	-
				-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	410.170.000,00	410.170.000,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	410.170.000,00	410.170.000,00	-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	410.170.000,00	410.170.000,00	-
				-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	729.903.750,00	803.503.750,00	73.600.000,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	729.903.750,00	803.503.750,00	73.600.000,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen dan Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Kabupaten Kota	729.903.750,00	803.503.750,00	73.600.000,00
				-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	170.000.000,00	110.000.000,00	(60.000.000,00)
2.17.2-17.0-00.0-00.01.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	170.000.000,00	110.000.000,00	(60.000.000,00)
2.17.2-17.0-00.0-00.01.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)
2.17.2-17.0-00.0-00.01.07.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	110.000.000,00	110.000.000,00	-
				-
2.17.2-17.0-00.0-00.01.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	659.000.000,00	819.000.000,00	160.000.000,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	659.000.000,00	819.000.000,00	160.000.000,00
2.17.2-17.0-00.0-00.01.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	659.000.000,00	819.000.000,00	160.000.000,00
				-

Urusan : 2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Organisasi : 2.18.2-18.0-00.0-00.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.595.677.486,00	9.734.315.544,00	1.138.638.058,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.595.677.486,00	9.734.315.544,00	1.138.638.058,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.574.077.486,00	8.639.019.544,00	1.064.942.058,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.250.000,00	23.250.000,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.250.000,00	23.250.000,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.183.477.486,00	7.148.419.544,00	964.942.058,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.083.077.486,00	7.048.019.544,00	964.942.058,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	100.400.000,00	100.400.000,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.467.912,00	284.467.912,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.900.449,00	100.900.449,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.567.463,00	16.567.463,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.000.000,00	95.000.000,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan undangan	7.000.000,00	7.000.000,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000,00	45.000.000,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139.500.000,00	139.500.000,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.500.000,00	139.500.000,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	790.500.000,00	890.500.000,00	100.000.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	190.500.000,00	190.500.000,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000.000,00	700.000.000,00	100.000.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.882.088,00	152.882.088,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.532.088,00	33.532.088,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.000.000,00	99.000.000,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.350.000,00	20.350.000,00	-

2.18.2-18.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	205.000.000,00	205.000.000,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02.2.02	Persentase Peningkatan Potensi Investasi Terpantau	205.000.000,00	205.000.000,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Peta Potensi Investasi Daerah dan Informasi Potensi Investasi lainnya secara Mutakhir	205.000.000,00	205.000.000,00	-
				-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	-
				-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	464.000.000,00	482.000.000,00	18.000.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	464.000.000,00	482.000.000,00	18.000.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	279.000.000,00	297.000.000,00	18.000.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	185.000.000,00	185.000.000,00	-
				-
2.18.2-18.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	302.600.000,00	358.296.000,00	55.696.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	302.600.000,00	358.296.000,00	55.696.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	264.940.000,00	342.936.000,00	77.996.000,00
2.18.2-18.0-00.0-00.01.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	37.660.000,00	15.360.000,00	(22.300.000,00)

Urusan : 2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : 2.19.2-19.0-00.0-00.01. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.835.454.078,00	14.589.305.301,00	1.753.851.223,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12.835.454.078,00	14.589.305.301,00	1.753.851.223,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.498.051.725,00	3.951.902.948,00	453.851.223,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.991.974,00	31.991.974,00	-
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.991.974,00	31.991.974,00	-
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.752.327.870,00	3.108.528.252,00	356.200.382,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.638.078.096,00	2.994.278.478,00	356.200.382,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	114.249.774,00	114.249.774,00	-
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.018.962,00	119.223.483,00	15.204.521,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.795.479,00	30.000.000,00	15.204.521,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	-
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.285.983,00	4.285.983,00	-
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	4.500.000,00	4.500.000,00	-
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.937.500,00	19.937.500,00	-
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	-
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	-
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	456.000.000,00	532.000.000,00	76.000.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456.000.000,00	532.000.000,00	76.000.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.712.919,00	125.159.239,00	6.446.320,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000,00	36.000.000,00	-
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.19.2-19.0-00.0-00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.712.919,00	87.159.239,00	6.446.320,00

2.19.2-19.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	749.112.301,00	1.149.112.301,00	400.000.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	49.112.169,00	449.112.169,00	400.000.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	27.155.140,00	427.155.140,00	400.000.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Wira Usaha Pemula	21.957.029,00	21.957.029,00	-
				-
2.19.2-19.0-00.0-00.01.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	700.000.132,00	700.000.132,00	-
2.19.2-19.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kota	700.000.132,00	700.000.132,00	-
				-
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.588.290.052,00	8.238.290.052,00	650.000.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	150.000.000,00	150.000.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	-	150.000.000,00	150.000.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah kabupaten/Kota	453.160.000,00	453.160.000,00	-
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota	453.160.000,00	453.160.000,00	-
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	6.529.951.400,00	6.929.951.400,00	400.000.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	6.529.951.400,00	6.929.951.400,00	400.000.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	605.178.652,00	705.178.652,00	100.000.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.05.01	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	468.511.154,00	568.511.154,00	100.000.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.03.2.05.03	Penyediaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	136.667.498,00	136.667.498,00	-
2.19.2-19.0-00.0-00.01.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	250.000.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	250.000.000,00
2.19.2-19.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	250.000.000,00

Urusan : 2.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Organisasi : 2.20.2-16.0-00.0-00.01. Dinas Komunikasi dan Informatika

2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	75.000.000,00	75.000.000,00	-
2.20.2-16.0-00.0-00.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	75.000.000,00	75.000.000,00	-
2.20.2-16.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	75.000.000,00	75.000.000,00	-
2.20.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	-
2.20.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	75.000.000,00	75.000.000,00	-
				-

Urusan : 2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : 2.21.2-16.0-00.0-00.01. Dinas Komunikasi dan Informatika

2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	-	161.000.000,00	161.000.000,00
2.21.2-16.0-00.0-00.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	161.000.000,00	161.000.000,00
2.21.2-16.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	161.000.000,00	161.000.000,00
2.21.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	161.000.000,00	161.000.000,00
2.21.2-16.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	-	161.000.000,00	161.000.000,00
				-

Urusan : 2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
 Organisasi : 2.22.1-01.2-22.0-00.02. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.898.900.000,00	1.898.900.000,00	-
2.22.1-01.2-22.0-00.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.898.900.000,00	1.898.900.000,00	-
2.22.1-01.2-22.0-00.02.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	700.000.000,00	700.000.000,00	-
2.22.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	700.000.000,00	700.000.000,00	-
2.22.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.01	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	700.000.000,00	700.000.000,00	-
				-
2.22.1-01.2-22.0-00.02.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.123.900.000,00	1.123.900.000,00	-
2.22.1-01.2-22.0-00.02.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.123.900.000,00	1.123.900.000,00	-
2.22.1-01.2-22.0-00.02.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	75.000.000,00	75.000.000,00	-
2.22.1-01.2-22.0-00.02.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.048.900.000,00	1.048.900.000,00	-
				-
2.22.1-01.2-22.0-00.02.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	75.000.000,00	75.000.000,00	-
2.22.1-01.2-22.0-00.02.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	-
2.22.1-01.2-22.0-00.02.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	75.000.000,00	75.000.000,00	-
				-

Urusan : 2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2-23.2-24.0-00.02. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.335.519.881,00	5.793.505.003,00	457.985.122,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.335.519.881,00	5.793.505.003,00	457.985.122,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.085.519.881,00	5.543.505.003,00	457.985.122,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.438.000,00	55.438.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.438.000,00	45.438.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.568.649.881,00	3.994.635.003,00	425.985.122,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.449.489.881,00	3.875.475.003,00	425.985.122,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasin Keuangan SKPD	119.160.000,00	119.160.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	15.000.000,00	15.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292.000.000,00	292.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.000.000,00	31.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000,00	65.000.000,00	-
				-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.07	Pengadaan Barak Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	728.500.000,00	698.500.000,00	(30.000.000,00)
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.07.01	Pegadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	450.000.000,00	450.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.000.000,00	115.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.500.000,00	33.500.000,00	(30.000.000,00)
				-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	270.400.000,00	302.400.000,00	32.000.000,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	78.400.000,00	78.400.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.000.000,00	224.000.000,00	32.000.000,00

2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.532.000,00	185.532.000,00	30.000.000,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.532.000,00	45.532.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	90.000.000,00	90.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.01.2.09.11	Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00
2.23.2-23.2-24.0-00.02.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	250.000.000,00	250.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	155.000.000,00	155.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	40.000.000,00	40.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.02.2.01.09	Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	70.000.000,00	70.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.000.000,00	95.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.02.2.02.01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Baca Membaca	50.000.000,00	50.000.000,00	-
2.23.2-23.2-24.0-00.02.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	40.000.000,00	40.000.000,00	-
				-

Urusan : 2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
 Organisasi : 2.24.2-23.2-24.0-00.02. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	305.970.000,00	305.970.000,00	-
2.24.2-23.2-24.0-00.02	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	305.970.000,00	305.970.000,00	-
2.24.2-23.2-24.0-00.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	295.970.000,00	295.970.000,00	-
2.24.2-23.2-24.0-00.02.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	-
2.24.2-23.2-24.0-00.02.02.2.01.01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2.24.2-23.2-24.0-00.02.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.24.2-23.2-24.0-00.02.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	35.970.000,00	35.970.000,00	-
2.24.2-23.2-24.0-00.02.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2.24.2-23.2-24.0-00.02.02.2.02.02	Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis	15.970.000,00	15.970.000,00	-
				-
2.24.2-23.2-24.0-00.02.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	230.000.000,00	230.000.000,00	-
2.24.2-23.2-24.0-00.02.02.2.03.01	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230.000.000,00	230.000.000,00	-
				-
2.24.2-23.2-24.0-00.02.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.24.2-23.2-24.0-00.02.03.2.01	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2.24.2-23.2-24.0-00.02.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	-
				-

Urusan : 3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.3-25.0-00.0-00.01. Dinas Kelautan dan Perikanan

3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	41.628.810.255,11	48.861.270.958,11	7.232.460.703,00
3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.340.389.932,00	5.463.057.998,00	1.122.668.066,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.340.389.932,00	5.463.057.998,00	1.122.668.066,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.999.254.547,00	4.445.274.547,00	446.020.000,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.001.551,00	26.001.551,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.001.551,00	26.001.551,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.817.269.932,00	3.163.289.932,00	346.020.000,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.692.389.932,00	3.002.049.932,00	309.660.000,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	124.880.000,00	161.240.000,00	36.360.000,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	25.000.000,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.256.439,00	197.256.439,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	9.639.851,00	9.639.851,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.255.701,00	45.255.701,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.969.760,00	14.969.760,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	34.950.000,00	34.950.000,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.401.127,00	24.401.127,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	5.040.000,00	5.040.000,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.000.000,00	58.000.000,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	25.000.000,00	25.000.000,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	694.200.000,00	794.200.000,00	100.000.000,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	46.200.000,00	46.200.000,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	648.000.000,00	748.000.000,00	100.000.000,00
				-

3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.526.625,00	179.526.625,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.530.000,00	33.530.000,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.496.625,00	136.496.625,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00	-
				-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	51.170.750,00	260.992.650,00	209.821.900,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	98.786.900,00	98.786.900,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan Kemitraan	-	98.786.900,00	98.786.900,00
				-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	51.170.750,00	162.205.750,00	111.035.000,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI	51.170.750,00	162.205.750,00	111.035.000,00
				-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	46.515.439,00	67.343.329,00	20.827.890,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	20.827.890,00	20.827.890,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	20.827.890,00	20.827.890,00
				-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	46.515.439,00	46.515.439,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 satu Daerah Kabupaten	46.515.439,00	46.515.439,00	-
				-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	43.139.898,00	43.139.898,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	43.139.898,00	43.139.898,00	-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten Kota	43.139.898,00	43.139.898,00	-
				-
3.25.3-25.0-00.0-00.01.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	200.309.298,00	646.307.574,00	445.998.276,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	200.309.298,00	646.307.574,00	445.998.276,00
3.25.3-25.0-00.0-00.01.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 satu Daerah Kabupaten Kota	200.309.298,00	646.307.574,00	445.998.276,00
				-

Urusan : 3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.3-26.0-00.0-00.01. Dinas Pariwisata

3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7.761.085.630,00	8.339.511.874,00	578.426.244,00
3.26.3-26.0-00.0-00.01	Dinas Pariwisata	7.761.085.630,00	8.339.511.874,00	578.426.244,00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.961.085.630,00	4.503.401.114,00	542.315.484,00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.641.422,00	51.641.422,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.641.422,00	51.641.422,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.063.094.208,00	3.496.019.692,00	432.925.484,00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.979.085.630,00	3.401.711.114,00	422.625.484,00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	84.008.578,00	94.308.578,00	10.300.000,00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.600.000,00	214.600.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	4.900.000,00	4.900.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.700.000,00	65.700.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.000.000,00	63.000.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	4.000.000,00	4.000.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.000.000,00	34.000.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	23.500.000,00	23.500.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.000.000,00	613.000.000,00	94.000.000,00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	63.000.000,00	63.000.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456.000.000,00	550.000.000,00	94.000.000,00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.750.000,00	84.140.000,00	15.390.000,00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.830.000,00	25.830.000,00	-

3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.920.000,00	14.920.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	16.000.000,00	16.000.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000,00	19.390.000,00	15.390.000,00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	250.000.000,00	275.425.660,00	25.425.660,00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	250.000.000,00	275.425.660,00	25.425.660,00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	25.425.660,00	25.425.660,00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	200.000.000,00	200.000.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	200.000.000,00	200.000.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.350.000.000,00	3.360.685.100,00	10.685.100,00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.350.000.000,00	3.360.685.100,00	10.685.100,00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	500.000.000,00	510.685.100,00	10.685.100,00
3.26.3-26.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	600.000.000,00	600.000.000,00	-
3.26.3-26.0-00.0-00.01.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	-
				-

Urusan : 3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.3-27.0-00.0-00.01. Dinas Pertanian

3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	11.055.588.511,00	12.347.852.111,00	1.292.263.600,00
3.27.3-27.0-00.0-00.01	Dinas Pertanian	11.055.588.511,00	12.347.852.111,00	1.292.263.600,00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.669.915.115,00	11.665.278.715,00	995.363.600,00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.319.541,00	47.319.541,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.319.541,00	47.319.541,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.568.304.439,00	9.284.380.039,00	716.075.600,00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.402.879.626,00	9.118.955.226,00	716.075.600,00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	165.424.813,00	165.424.813,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.857.175,00	144.857.175,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.512.800,00	54.512.800,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.644.750,00	6.644.750,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.699.625,00	34.699.625,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	4.000.000,00	4.000.000,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	40.000.000,00	40.000.000,00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	40.000.000,00	40.000.000,00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.462.750.000,00	1.678.750.000,00	216.000.000,00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	190.750.000,00	190.750.000,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.08.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.272.000.000,00	1.488.000.000,00	216.000.000,00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.683.960,00	459.971.960,00	23.288.000,00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.532.088,00	33.532.088,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	393.151.872,00	416.439.872,00	23.288.000,00

3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-
				-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	110.000.000,00	330.000.000,00	220.000.000,00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	30.000.000,00	30.000.000,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	30.000.000,00	30.000.000,00	-
				-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	80.000.000,00	300.000.000,00	220.000.000,00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan Tanaman	50.000.000,00	50.000.000,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan Tanaman	30.000.000,00	250.000.000,00	220.000.000,00
				-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	11.000.000,00	11.000.000,00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	11.000.000,00	11.000.000,00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	-	11.000.000,00	11.000.000,00
				-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	185.575.000,00	251.475.000,00	65.900.000,00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	54.000.000,00	54.000.000,00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	-	54.000.000,00	54.000.000,00
				-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan atau	25.000.000,00	25.000.000,00	-
				-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam	160.575.000,00	172.475.000,00	11.900.000,00
3.27.3-27.0-00.0-00.01.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	160.575.000,00	172.475.000,00	11.900.000,00
				-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.07	Program Penyuluhan Pertanian	90.098.396,00	90.098.396,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	90.098.396,00	90.098.396,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.07.2.01.02	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	55.598.396,00	55.598.396,00	-
3.27.3-27.0-00.0-00.01.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	34.500.000,00	34.500.000,00	-
				-

Urusan : 3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : 3.30.3-30.0-00.0-00.01. Dinas Perdagangan

3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	13.423.725.527,11	16.365.112.920,11	2.941.387.393,00
3.30.3-30.0-00.0-00.01	Dinas Perdagangan	13.423.725.527,11	16.365.112.920,11	2.941.387.393,00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.108.680.902,11	12.570.236.902,11	1.461.556.000,00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.774.240,00	98.774.240,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98.774.240,00	98.774.240,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.118.396.932,00	8.909.384.932,00	790.988.000,00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.983.696.932,00	8.774.684.932,00	790.988.000,00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	134.700.000,00	134.700.000,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.953.630,78	293.953.630,78	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.403.202,38	37.403.202,38	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000,00	7.500.000,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	116.550.428,40	116.550.428,40	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan undangan	4.500.000,00	4.500.000,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	90.000.000,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	236.597.232,00	362.197.232,00	125.600.000,00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.000.000,00	175.000.000,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.147.232,00	140.747.232,00	125.600.000,00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.450.000,00	46.450.000,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.895.185.319,33	2.191.185.319,33	296.000.000,00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100.685.319,33	100.685.319,33	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.794.500.000,00	2.090.500.000,00	296.000.000,00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.773.548,00	714.741.548,00	248.968.000,00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatann	46.138.147,00	46.138.147,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	264.035.401,00	276.475.401,00	12.440.000,00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.600.000,00	5.600.000,00	-

3.30.3-30.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	386.528.000,00	236.528.000,00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	804.500.000,00	1.188.356.393,00	383.856.393,00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	567.000.000,00	950.856.393,00	383.856.393,00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	383.856.393,00	383.856.393,00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	567.000.000,00	567.000.000,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	237.500.000,00	237.500.000,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	75.000.000,00	75.000.000,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	162.500.000,00	162.500.000,00	-
				-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	644.550.000,00	1.740.525.000,00	1.095.975.000,00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	644.550.000,00	1.740.525.000,00	1.095.975.000,00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	80.000.000,00	80.000.000,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 Satu Kabupaten/Kota	564.550.000,00	1.660.525.000,00	1.095.975.000,00
3.30.3-30.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	406.209.625,00	406.209.625,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	406.209.625,00	406.209.625,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	406.209.625,00	406.209.625,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	334.785.000,00	334.785.000,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	334.785.000,00	334.785.000,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	166.300.000,00	166.300.000,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.06.2.01.02	Pengawasan Penyuluhan Metrologi Legal	168.485.000,00	168.485.000,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	125.000.000,00	125.000.000,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	125.000.000,00	125.000.000,00	-
3.30.3-30.0-00.0-00.01.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	125.000.000,00	125.000.000,00	-

Urusan : 3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3-31.0-00.0-00.01. Dinas Perindustrian

3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.048.020.655,00	6.345.736.055,00	1.297.715.400,00
3.31.3-31.0-00.0-00.01	Dinas Perindustrian	5.048.020.655,00	6.345.736.055,00	1.297.715.400,00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.052.705.170,00	3.424.946.370,00	372.241.200,00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.103.800,00	34.103.800,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA/SKPD	8.400.000,00	8.400.000,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	25.703.800,00	25.703.800,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.181.337.855,00	2.505.579.055,00	324.241.200,00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.081.020.655,00	2.405.261.855,00	324.241.200,00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	92.317.200,00	92.317.200,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	8.000.000,00	8.000.000,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.000.000,00	8.000.000,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.548.115,00	217.548.115,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.475.515,00	44.475.515,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.672.000,00	14.672.000,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.000.600,00	38.000.600,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	5.400.000,00	5.400.000,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	493.500.000,00	541.500.000,00	48.000.000,00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	109.500.000,00	109.500.000,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	384.000.000,00	432.000.000,00	48.000.000,00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.215.400,00	68.215.400,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	48.215.400,00	48.215.400,00	-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-

3.31.3-31.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-
				-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.945.315.485,00	2.787.650.135,00	842.334.650,00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.945.315.485,00	2.787.650.135,00	842.334.650,00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	378.183.300,00	378.183.300,00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.02.2.01.05	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.945.315.485,00	2.409.466.835,00	464.151.350,00
				-
3.31.3-31.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	133.139.550,00	83.139.550,00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	133.139.550,00	83.139.550,00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional SIINas yang terintegrasi dengan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional SIINas	-	19.260.000,00	19.260.000,00
3.31.3-31.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota	50.000.000,00	113.879.550,00	63.879.550,00
				-

Urusan : 4.01. SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.4-01.0-00.0-00.01. Sekretariat Daerah

4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	205.560.260.898,00	271.139.989.194,00	65.579.728.296,00
4,01	SEKRETARIAT DAERAH	106.495.089.687,00	158.007.065.162,00	51.511.975.475,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01	Sekretariat Daerah	106.495.089.687,00	158.007.065.162,00	51.511.975.475,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	77.085.858.303,35	97.242.918.344,35	20.157.060.041,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000.000,00	470.000.000,00	20.000.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	171.000.000,00	171.000.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.000.000,00	170.000.000,00	20.000.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.000.000,00	129.000.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	32.034.120.113,00	35.407.262.391,00	3.373.142.278,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	31.157.201.104,00	34.467.343.382,00	3.310.142.278,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	371.000.000,00	371.000.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	408.415.906,00	446.415.906,00	38.000.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.002.103,00	52.002.103,00	25.000.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	70.501.000,00	70.501.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	379.939.250,00	501.314.250,00	121.375.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	278.125.000,00	399.500.000,00	121.375.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	26.814.250,00	26.814.250,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	75.000.000,00	75.000.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.440.277.600,84	13.795.945.500,84	5.355.667.900,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	66.717.500,00	66.717.500,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	371.000.000,00	623.780.000,00	252.780.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	420.221.912,00	492.024.412,00	71.802.500,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.296.000.000,00	1.673.834.500,00	377.834.500,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350.000.000,00	724.553.000,00	374.553.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1.494.493.971,00	1.779.812.971,00	285.319.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.700.000.000,00	6.493.378.900,00	2.793.378.900,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	741.844.217,84	1.941.844.217,84	1.200.000.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	6.900.000.000,00	10.303.395.000,00	3.403.395.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	3.780.000.000,00	4.484.800.000,00	704.800.000,00

4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	499.000.000,00	1.200.860.000,00	701.860.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	1.621.000.000,00	3.617.735.000,00	1.996.735.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.006.510.000,00	20.893.510.000,00	5.887.000.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4.155.385.000,00	6.655.385.000,00	2.500.000.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.875.000,00	560.875.000,00	60.000.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.350.250.000,00	13.677.250.000,00	3.327.000.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.527.316.536,00	10.323.796.399,00	1.796.479.863,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.256.316.536,00	3.986.100.536,00	729.784.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	200.000.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270.000.000,00	666.850.000,00	396.850.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	561.000.000,00	634.659.000,00	73.659.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.240.000.000,00	4.836.186.863,00	596.186.863,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.430.503.824,00	1.430.503.824,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	1.430.503.824,00	1.430.503.824,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.13	Penataan Organisasi	479.367.329,51	479.367.329,51	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	207.489.329,51	207.489.329,51	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	143.464.500,00	143.464.500,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	128.413.500,00	128.413.500,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.437.823.650,00	3.637.823.650,00	200.000.000,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	1.519.013.750,00	1.519.013.750,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	212.277.900,00	406.942.470,00	194.664.570,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.706.532.000,00	1.711.867.430,00	5.335.430,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	26.059.565.104,13	57.414.480.538,13	31.354.915.434,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.083.147.767,13	1.083.147.767,13	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	50.050.000,00	50.050.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	517.518.947,13	517.518.947,13	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	515.578.820,00	515.578.820,00	-

4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	23.017.173.437,00	54.074.356.578,00	31.057.183.141,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	22.267.173.437,00	53.324.356.578,00	31.057.183.141,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	250.000.000,00	250.000.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.104.600.000,00	1.402.332.293,00	297.732.293,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	194.425.000,00	194.425.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	521.545.000,00	819.277.293,00	297.732.293,00
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	388.630.000,00	388.630.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	854.643.900,00	854.643.900,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	599.285.995,25	599.285.995,25	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	118.515.600,00	118.515.600,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	136.842.304,75	136.842.304,75	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.349.666.279,52	3.349.666.279,52	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	487.115.000,00	487.115.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Koordinasi sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	167.115.000,00	167.115.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	215.000.000,00	215.000.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kecil	105.000.000,00	105.000.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.611.456.979,52	1.611.456.979,52	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	113.675.000,00	113.675.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1.128.560.000,00	1.128.560.000,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	369.221.979,52	369.221.979,52	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang	1.251.094.300,00	1.251.094.300,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	389.238.888,00	389.238.888,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	605.504.624,00	605.504.624,00	-
4.01.4-01.0-00.0-00.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	256.350.788,00	256.350.788,00	-
				-

Urusan : 4.02. SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.4-02.0-00.0-00.01. Sekretariat DPRD

4,02	SEKRETARIAT DPRD	99.065.171.211,00	113.132.924.032,00	14.067.752.821,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01	Sekretariat DPRD	99.065.171.211,00	113.132.924.032,00	14.067.752.821,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	62.356.067.313,00	66.788.403.208,00	4.432.335.895,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	473.244.191,00	473.244.191,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	143.435.000,00	143.435.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	53.004.000,00	53.004.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	53.004.000,00	53.004.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	127.000.000,00	127.000.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.801.191,00	96.801.191,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.502.907.049,00	7.043.001.449,00	540.094.400,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.646.713.049,00	6.186.807.449,00	540.094.400,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	507.200.000,00	507.200.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	78.020.000,00	78.020.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	235.615.000,00	235.615.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	35.359.000,00	35.359.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	550.000.000,00	250.000.000,00	(300.000.000,00)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.05.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	505.000.000,00	205.000.000,00	(300.000.000,00)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000,00	45.000.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.398.256.925,00	3.058.316.989,00	660.060.064,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	51.550.000,00	51.550.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	162.728.000,00	12.728.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	111.385.500,00	140.194.500,00	28.809.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	596.500.000,00	744.031.500,00	147.531.500,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	148.000.000,00	382.923.000,00	234.923.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	684.250.000,00	705.300.000,00	21.050.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	165.000.000,00	245.768.000,00	80.768.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	491.571.425,00	625.821.989,00	134.250.564,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.870.097.743,00	4.219.489.983,00	1.349.392.240,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	80.000.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	662.137.550,00	991.242.006,00	329.104.456,00

4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	305.808.766,00	505.308.766,00	199.500.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.822.151.427,00	2.642.939.211,00	820.787.784,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.326.350.000,00	7.387.364.756,00	1.061.014.756,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.100.000,00	53.100.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	516.000.000,00	769.014.756,00	253.014.756,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.757.250.000,00	6.565.250.000,00	808.000.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.065.980.000,00	1.839.430.700,00	(226.549.300,00)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.675.000,00	80.900.000,00	33.225.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	585.805.000,00	857.810.700,00	272.005.700,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.500.000,00	182.500.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	550.000.000,00	718.220.000,00	168.220.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	700.000.000,00	-	(700.000.000,00)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	38.967.691.715,00	38.980.284.407,00	12.592.692,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	37.271.191.715,00	37.271.191.715,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.546.500.000,00	1.546.500.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000,00	162.592.692,00	12.592.692,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	2.201.539.690,00	3.537.270.733,00	1.335.731.043,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	276.000.000,00	276.000.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	49.000.000,00	49.000.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	887.808.506,00	2.038.908.506,00	1.151.100.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	988.731.184,00	1.173.362.227,00	184.631.043,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	36.709.103.898,00	46.344.520.824,00	9.635.416.926,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	6.501.276.047,00	7.301.176.215,00	799.900.168,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.055.338.821,00	1.175.768.821,00	120.430.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.103.737.226,00	4.712.597.394,00	608.860.168,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan	150.000.000,00	220.610.000,00	70.610.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	1.192.200.000,00	1.192.200.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	3.500.000.000,00	3.447.062.520,00	(52.937.480,00)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	700.000.000,00	714.607.000,00	14.607.000,00

4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	700.000.000,00	692.487.000,00	(7.513.000,00)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Pembahasan APBD	700.000.000,00	750.472.432,00	50.472.432,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	700.000.000,00	695.396.088,00	(4.603.912,00)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	700.000.000,00	594.100.000,00	(105.900.000,00)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.878.092.885,00	7.872.161.500,00	994.068.615,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.257.000.000,00	1.577.000.000,00	320.000.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.190.000.000,00	1.530.312.588,00	340.312.588,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.242.000.000,00	1.677.402.183,00	435.402.183,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.220.000.000,00	1.615.685.229,00	395.685.229,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.321.360.000,00	1.016.361.500,00	(304.998.500,00)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	167.032.885,00	24.700.000,00	(142.332.885,00)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	480.700.000,00	430.700.000,00	(50.000.000,00)
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	16.452.582.185,00	24.325.025.808,00	7.872.443.623,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.803.625.800,00	2.803.625.800,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.223.044.710,00	1.623.238.710,00	400.194.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.728.000.000,00	1.728.000.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	384.000.000,00	384.000.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	10.015.911.675,00	17.488.161.298,00	7.472.249.623,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	298.000.000,00	298.000.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	494.522.791,00	516.464.791,00	21.942.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.05.02	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	294.522.791,00	316.464.791,00	21.942.000,00
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	650.000.000,00	650.000.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	650.000.000,00	650.000.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.08	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.232.629.990,00	2.232.629.990,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.259.126.000,00	1.259.126.000,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	50.735.990,00	50.735.990,00	-
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	922.768.000,00	922.768.000,00	-
				-

Urusan : 5.01. PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5-01.0-00.0-00.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	268.385.917.987,89	254.355.471.974,89	(14.030.446.013,00)
5,01	PERENCANAAN	11.448.880.101,00	12.477.544.101,00	1.028.664.000,00
5.01.5-01.0-00.0-00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.448.880.101,00	12.477.544.101,00	1.028.664.000,00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.388.880.101,00	9.358.793.701,00	969.913.600,00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.705.880.101,00	7.647.793.701,00	941.913.600,00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.430.880.101,00	7.372.793.701,00	941.913.600,00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	190.000.000,00	190.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.000.000,00	35.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	582.500.000,00	597.500.000,00	15.000.000,00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	30.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.500.000,00	37.500.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	115.000.000,00	15.000.000,00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan undangan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan Tamu	35.000.000,00	35.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	250.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00

5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.750.000,00	296.000.000,00	(3.750.000,00)
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000,00	80.000.000,00	(50.000.000,00)
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.750.000,00	216.000.000,00	46.250.000,00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.750.000,00	417.500.000,00	(33.250.000,00)
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.000.000,00	170.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.750.000,00	40.750.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	166.750.000,00	(33.250.000,00)
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	880.000.000,00	880.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	90.000.000,00	90.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD Lintas SKPD	90.000.000,00	90.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	450.000.000,00	450.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.03.03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	220.000.000,00	220.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.510.000.000,00	1.568.750.400,00	58.750.400,00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	610.000.000,00	610.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan RPJPD RPJMD dan RKPD	150.000.000,00	150.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	80.000.000,00	80.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	80.000.000,00	80.000.000,00	-

5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia RPJPD RPJMD dan RKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	300.000.000,00	300.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian RPJPD RPJMD dan RKPD	60.000.000,00	60.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	60.000.000,00	60.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	60.000.000,00	60.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA RPJPD RPJMD dan RKPD	40.000.000,00	40.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	40.000.000,00	40.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	40.000.000,00	40.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	600.000.000,00	658.750.400,00	58.750.400,00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	250.000.000,00	271.250.400,00	21.250.400,00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	70.000.000,00	85.000.000,00	15.000.000,00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	70.000.000,00	81.250.000,00	11.250.000,00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	70.000.000,00	81.250.000,00	11.250.000,00
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	-
5.01.5-01.0-00.0-00.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	70.000.000,00	70.000.000,00	-

Urusan : 5.02. KEUANGAN
Organisasi : 5.02.5-02.0-00.0-00.02. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5,02	KEUANGAN	247.837.807.692,89	231.508.848.750,89	(16.328.958.942,00)
5.02.5-02.0-00.0-00.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	187.147.318.403,89	169.749.633.773,89	(17.397.684.630,00)
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.972.195.275,89	87.546.633.275,89	(425.562.000,00)
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	564.090.138,00	687.048.299,00	122.958.161,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	116.170.460,00	143.805.601,00	27.635.141,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	57.024.241,00	57.024.241,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	54.192.655,00	54.192.655,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	65.939.740,00	65.939.740,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	59.169.677,00	59.169.677,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	104.005.320,00	170.699.685,00	66.694.365,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.588.045,00	136.216.700,00	28.628.655,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.745.972.935,34	79.557.803.776,34	(1.188.169.159,00)
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80.178.775.535,34	78.915.606.376,34	(1.263.169.159,00)
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	298.949.400,00	308.949.400,00	10.000.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	268.248.000,00	333.248.000,00	65.000.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	155.466.875,00	223.466.875,00	68.000.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	155.466.875,00	223.466.875,00	68.000.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.870.350,00	74.870.350,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	74.870.350,00	74.870.350,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.221.835.820,19	1.357.484.818,19	135.648.998,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	115.004.500,00	115.004.500,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.008.936,00	180.008.936,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78.321.478,00	78.321.478,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.625.000,00	79.625.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	188.719.597,00	188.719.597,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	38.040.000,00	38.040.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	161.789.950,00	161.789.950,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.782.847,19	170.782.847,19	50.000.000,00

5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	259.543.512,00	345.192.510,00	85.648.998,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	804.816.477,36	904.816.477,36	100.000.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	650.000.000,00	750.000.000,00	100.000.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	154.816.477,36	154.816.477,36	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.759.874.000,00	4.045.874.000,00	286.000.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	174.810.000,00	174.810.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.585.064.000,00	3.871.064.000,00	286.000.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	645.268.680,00	695.268.680,00	50.000.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.966.675,00	52.966.675,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	392.302.005,00	392.302.005,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000,00	80.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000,00	170.000.000,00	50.000.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	96.897.615.695,00	79.573.631.065,00	(17.323.984.630,00)
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.831.695.084,00	4.707.792.324,00	(123.902.760,00)
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	702.072.863,00	702.072.863,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	354.431.669,00	354.431.669,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	503.000.000,00	550.000.000,00	47.000.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	628.880.000,00	628.880.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	444.797.892,00	444.797.892,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1.560.575.538,00	1.389.672.778,00	(170.902.760,00)
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	637.937.122,00	637.937.122,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	6.276.892.755,00	7.027.495.515,00	750.602.760,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3.190.199.705,00	3.190.199.705,00	750.602.760,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.03	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1.158.273.185,00	1.329.175.945,00	170.902.760,00

5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.06	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	350.773.100,00	550.873.100,00	200.100.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	430.601.327,00	581.101.327,00	150.500.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	93.327.538,00	93.327.538,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	603.325.000,00	832.425.000,00	229.100.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	450.392.900,00	450.392.900,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	992.612.764,00	1.059.612.764,00	67.000.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	191.455.500,00	191.455.500,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	139.080.597,00	139.080.597,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota	187.035.000,00	261.760.847,00	74.725.847,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.03.07	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	73.964.375,00	32.738.528,00	(41.225.847,00)
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kota	348.306.042,00	348.306.042,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten kota	52.771.250,00	86.271.250,00	33.500.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	82.861.402.323,00	64.910.717.693,00	(17.950.684.630,00)
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.04.03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah	43.000.000,00	43.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga	12.675.516.689,00	12.675.516.689,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	37.067.885.634,00	47.067.885.634,00	10.000.000.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	33.075.000.000,00	5.124.315.370,00	(27.950.684.630,00)
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	1.935.012.769,00	1.868.012.769,00	(67.000.000,00)
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	281.600.000,00	214.600.000,00	(67.000.000,00)
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	310.862.000,00	310.862.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1.342.550.769,00	1.342.550.769,00	-
				-

5.02.5-02.0-00.0-00.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.277.507.433,00	2.629.369.433,00	351.862.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.277.507.433,00	2.629.369.433,00	351.862.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	195.000.000,00	195.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	60.003.125,00	60.003.125,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	877.241.875,00	877.241.875,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	103.595.574,00	143.595.574,00	40.000.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	264.946.301,00	333.008.301,00	68.062.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	572.753.432,00	747.753.432,00	175.000.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	203.967.126,00	272.767.126,00	68.800.000,00
				-

Urusan : 5.02. KEUANGAN
Organisasi : 5.02.5-02.0-00.0-00.03. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

5.02.5-02.0-00.0-00.03	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	60.690.489.289,00	61.759.214.977,00	1.068.725.688,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.094.264.289,00	54.067.239.977,00	972.975.688,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	253.000.000,00	253.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.000.000,00	53.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.439.253.483,00	44.439.253.483,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.353.745.483,00	43.353.745.483,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	189.008.000,00	174.008.000,00	(15.000.000,00)
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	196.500.000,00	211.500.000,00	15.000.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	700.000.000,00	700.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	816.000.000,00	816.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.000.000,00	198.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	67.000.000,00	67.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	170.000.000,00	170.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	75.000.000,00	75.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	572.000.000,00	765.800.000,00	193.800.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	297.000.000,00	490.800.000,00	193.800.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000,00	125.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.032.000.000,00	5.811.175.688,00	779.175.688,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	253.675.688,00	3.675.688,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.782.000.000,00	5.557.500.000,00	775.500.000,00

5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.882.010.806,00	1.882.010.806,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	498.230.000,00	498.230.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	29.200.000,00	29.200.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.338.806,00	44.338.806,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.260.242.000,00	1.260.242.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.596.225.000,00	7.691.975.000,00	95.750.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.596.225.000,00	7.691.975.000,00	95.750.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	850.000.000,00	850.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	214.500.000,00	214.500.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	195.000.000,00	195.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	700.000.000,00	700.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.06	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	550.000.000,00	550.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBBP2 serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB	500.000.000,00	551.450.000,00	51.450.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	850.000.000,00	850.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	186.725.000,00	186.725.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	550.000.000,00	569.900.000,00	19.900.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	200.000.000,00	224.400.000,00	24.400.000,00
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.13	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	-
5.02.5-02.0-00.0-00.03.04.2.01.15	Elektronika Transaksi Pemerintah Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	-
				-

Urusan : 5.03. KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5-03.0-00.0-00.01. Badan Kepegawaian Daerah

5.03	KEPEGAWAIAN	7.209.280.900,00	8.543.695.853,00	1.334.414.953,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01	Badan Kepegawaian Daerah	7.209.280.900,00	8.543.695.853,00	1.334.414.953,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.894.828.608,00	5.523.834.446,00	629.005.838,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.270.000,00	106.180.000,00	7.910.000,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	18.095.000,00	(1.905.000,00)
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	21.000.000,00	34.315.000,00	13.315.000,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	15.000.000,00	11.500.000,00	(3.500.000,00)
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.000.000,00	16.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.270.000,00	26.270.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.926.506.803,00	4.399.268.772,00	472.761.969,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.625.230.194,00	4.153.972.163,00	528.741.969,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	212.826.609,00	156.846.609,00	(55.980.000,00)
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24.000.000,00	24.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.450.000,00	30.450.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semesteran SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.000.000,00	9.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.296.719,00	331.296.719,00	60.000.000,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.307.051,00	65.307.051,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.003.218,00	30.003.218,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.486.450,00	65.486.450,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.500.000,00	20.500.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	120.000.000,00	60.000.000,00

5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.815.086,00	86.148.955,00	40.333.869,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.500.000,00	4.500.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	31.315.086,00	71.648.955,00	40.333.869,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	378.000.000,00	426.000.000,00	48.000.000,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.000.000,00	408.000.000,00	48.000.000,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.940.000,00	154.940.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.670.000,00	40.670.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.270.000,00	51.270.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.314.452.292,00	3.019.861.407,00	705.409.115,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	491.000.000,00	592.071.960,00	101.071.960,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	167.100.000,00	151.631.960,00	(15.468.040,00)
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	59.000.000,00	90.540.000,00	31.540.000,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	41.000.000,00	41.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	78.900.000,00	88.900.000,00	10.000.000,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	85.000.000,00	160.000.000,00	75.000.000,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.01.12	Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	20.000.000,00	20.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	295.000.000,00	317.535.000,00	22.535.000,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	100.000.000,00	117.500.000,00	17.500.000,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	115.000.000,00	120.035.000,00	5.035.000,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	80.000.000,00	80.000.000,00	-

5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.338.452.292,00	1.910.254.447,00	571.802.155,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	10.697.378,00	10.697.378,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	280.000.000,00	280.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	305.884.914,00	246.884.914,00	(59.000.000,00)
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	680.000.000,00	1.269.850.000,00	589.850.000,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	32.000.000,00	32.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	19.600.000,00	19.600.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	10.270.000,00	51.222.155,00	40.952.155,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	190.000.000,00	200.000.000,00	10.000.000,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	75.000.000,00	85.000.000,00	10.000.000,00
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	45.000.000,00	45.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30.000.000,00	30.000.000,00	-
5.03.5-03.0-00.0-00.01.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	-
				-

Urusan : 5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : 5.04.5-03.0-00.0-00.01. Badan Kepegawaian Daerah

5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	739.949.294,00	628.233.270,00	(111.716.024,00)
5.04.5-03.0-00.0-00.01	Badan Kepegawaian Daerah	739.949.294,00	628.233.270,00	(111.716.024,00)
5.04.5-03.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	739.949.294,00	628.233.270,00	(111.716.024,00)
5.04.5-03.0-00.0-00.01.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	739.949.294,00	628.233.270,00	(111.716.024,00)
5.04.5-03.0-00.0-00.01.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	448.949.294,00	255.221.294,00	(193.728.000,00)
5.04.5-03.0-00.0-00.01.02.2.02.08	Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Kepemimpinan dan Prajabatan	291.000.000,00	373.011.976,00	82.011.976,00
				-

Urusan : 5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : 5.05.5-01.0-00.0-00.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.150.000.000,00	1.197.150.000,00	47.150.000,00
5.05.5-01.0-00.0-00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.150.000.000,00	1.197.150.000,00	47.150.000,00
5.05.5-01.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.150.000.000,00	1.197.150.000,00	47.150.000,00
5.05.5-01.0-00.0-00.01.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	200.000.000,00	247.150.000,00	47.150.000,00
5.05.5-01.0-00.0-00.01.02.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi	200.000.000,00	247.150.000,00	47.150.000,00
5.05.5-01.0-00.0-00.01.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	450.000.000,00	450.000.000,00	-
5.05.5-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	150.000.000,00	150.000.000,00	-
5.05.5-01.0-00.0-00.01.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	300.000.000,00	300.000.000,00	-
5.05.5-01.0-00.0-00.01.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	-
5.05.5-01.0-00.0-00.01.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000,00	200.000.000,00	-
5.05.5-01.0-00.0-00.01.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	300.000.000,00	300.000.000,00	-
5.05.5-01.0-00.0-00.01.02.2.04.01	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	300.000.000,00	300.000.000,00	-

Urusan : 6.01. INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.6-01.0-00.0-00.01. Inspektorat

6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	18.108.000.000,00	20.900.648.400,00	2.792.648.400,00
6,01	INSPEKTORAT DAERAH	18.108.000.000,00	20.900.648.400,00	2.792.648.400,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01	Inspektorat	18.108.000.000,00	20.900.648.400,00	2.792.648.400,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.309.471.722,00	15.865.159.780,00	2.555.688.058,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.792.586,60	122.792.586,60	30.000.000,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.160.222,85	46.160.222,85	-
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.632.363,75	76.632.363,75	30.000.000,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.068.168.717,55	13.518.037.117,55	2.449.868.400,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.892.000.000,00	13.341.868.400,00	2.449.868.400,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	125.408.294,55	125.408.294,55	-
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	50.760.423,00	50.760.423,00	-
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	330.000.000,00	402.250.000,00	72.250.000,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	206.100.000,00	106.100.000,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	230.000.000,00	196.150.000,00	(33.850.000,00)
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	923.209.194,85	942.778.852,85	19.569.658,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	15.994.671,00	15.994.671,00	-
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.597.614,00	123.167.272,00	19.569.658,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.000.000,00	72.000.000,00	-
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.455.369,00	101.455.369,00	-
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	21.600.000,00	21.600.000,00	-
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	76.000.000,00	76.000.000,00	-
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	532.561.540,85	532.561.540,85	-
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	295.000.000,00	255.000.000,00	(40.000.000,00)
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	110.000.000,00	70.000.000,00	(40.000.000,00)
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185.000.000,00	185.000.000,00	-
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.520.000,00	276.520.000,00	24.000.000,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12.520.000,00	12.520.000,00	-
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.000.000,00	264.000.000,00	24.000.000,00

6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.781.223,00	347.781.223,00	-
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.532.088,00	33.532.088,00	-
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	261.749.135,00	261.749.135,00	-
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.500.000,00	52.500.000,00	-
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.532.048.578,00	2.862.975.920,00	330.927.342,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.242.050.000,00	2.545.477.000,00	303.427.000,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.230.000.000,00	1.392.955.000,00	162.955.000,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	330.000.000,00	407.193.000,00	77.193.000,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	370.000.000,00	389.829.000,00	19.829.000,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	140.000.000,00	157.200.000,00	17.200.000,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	22.050.000,00	-	(22.050.000,00)
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	150.000.000,00	198.300.000,00	48.300.000,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	289.998.578,00	317.498.920,00	27.500.342,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara Daerah	32.498.584,00	19.998.584,00	(12.500.000,00)
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	257.499.994,00	297.500.336,00	40.000.342,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASITENSI	2.266.479.700,00	2.172.512.700,00	(93.967.000,00)
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	2.266.479.700,00	2.172.512.700,00	(93.967.000,00)
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	182.500.000,00	186.783.000,00	4.283.000,00
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.1.02.02	Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	75.000.000,00	46.000.000,00	(29.000.000,00)
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.1.02.03	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	1.995.000.000,00	1.925.750.000,00	(69.250.000,00)
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.1.02.04	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	13.979.700,00	13.979.700,00	-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.01. Kecamatan Tanjung Karang Pusat

7	UNSUR KEWILAYAHAN	219.561.890.158,00	265.877.589.068,00	46.315.698.910,00
7,01	KECAMATAN	219.561.890.158,00	265.877.589.068,00	46.315.698.910,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	11.948.945.180,00	14.513.757.415,00	2.564.812.235,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.523.800.433,00	6.440.612.668,00	916.812.235,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.287.394,00	39.287.394,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.488.229,00	11.488.229,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	16.537.261,00	16.537.261,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.261.904,00	11.261.904,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.294.345.180,00	4.907.471.991,00	613.126.811,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.200.595.180,00	4.797.821.991,00	597.226.811,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	93.750.000,00	109.650.000,00	15.900.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.914.047,00	74.914.047,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	4.357.110,00	4.357.110,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.386.437,00	19.386.437,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.633.000,00	11.633.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.537.500,00	12.537.500,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	995.050.000,00	1.256.639.424,00	261.589.424,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	38.400.000,00	49.989.424,00	11.589.424,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.650.000,00	1.206.650.000,00	250.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.203.812,00	162.299.812,00	22.096.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.532.088,00	33.532.088,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.671.724,00	116.507.724,00	11.836.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	12.260.000,00	10.260.000,00

7.01.7-01.0-00.0-00.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	3.490.344.747,00	4.064.344.747,00	574.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.400.000,00	33.400.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	33.400.000,00	33.400.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.456.944.747,00	4.030.944.747,00	574.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.456.944.747,00	4.030.944.747,00	574.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	649.500.000,00	1.349.500.000,00	700.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	579.500.000,00	579.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	579.500.000,00	579.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	70.000.000,00	70.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.000.000,00	7.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.283.300.000,00	2.657.300.000,00	374.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.283.300.000,00	2.657.300.000,00	374.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.260.300.000,00	2.634.300.000,00	374.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.000.000,00	23.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	500.000,00	500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	500.000,00	500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	500.000,00	500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	500.000,00	500.000,00	-
				-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.02. Kecamatan Tanjung Karang Barat

7.01.7-01.0-00.0-00.02	Kecamatan Tanjung Karang Barat	11.616.694.968,00	14.085.129.795,00	2.468.434.827,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.330.312.045,00	6.210.194.842,00	879.882.797,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.806.759,00	5.806.759,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.938.472,00	1.938.472,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.938.472,00	1.938.472,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.929.815,00	1.929.815,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.406.797.439,00	5.021.892.295,00	615.094.856,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.312.494.968,00	4.903.392.295,00	590.897.327,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	94.302.471,00	118.500.000,00	24.197.529,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.875.453,00	76.161.558,00	22.286.105,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	3.231.502,00	5.084.194,00	1.852.692,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.405.814,00	22.758.526,00	7.352.712,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.613.037,00	11.693.738,00	4.080.701,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.125.000,00	13.125.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.500.100,00	3.500.100,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.000.000,00	20.000.000,00	9.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.435.450,00	12.435.450,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	12.435.450,00	12.435.450,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	665.650.000,00	846.650.000,00	181.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	625.650.000,00	806.650.000,00	181.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.746.944,00	247.248.780,00	61.501.836,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.728.692,00	34.728.692,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.395.980,00	71.545.980,00	(1.850.000,00)
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.002.272,00	128.474.108,00	72.471.836,00

7.01.7-01.0-00.0-00.02.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.120.000,00	6.000.000,00	(9.120.000,00)
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	3.265.909.806,00	3.800.776.032,00	534.866.226,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.183.827,00	37.183.827,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	37.183.827,00	37.183.827,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.228.725.979,00	3.763.592.205,00	534.866.226,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.228.725.979,00	3.763.592.205,00	534.866.226,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	818.488.979,00	1.518.033.969,00	699.544.990,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	748.488.979,00	748.033.969,00	(455.010,00)
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	748.488.979,00	748.033.969,00	(455.010,00)
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	70.000.000,00	70.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.000.000,00	7.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.02.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.000.000,00	7.000.000,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.188.472.028,00	2.544.747.215,00	356.275.187,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.188.472.028,00	2.544.747.215,00	356.275.187,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.164.203.021,00	2.521.192.205,00	356.989.184,00
7.01.7-01.0-00.0-00.02.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.269.007,00	23.555.010,00	(713.997,00)
7.01.7-01.0-00.0-00.02.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.103.510,00	4.969.137,00	(2.134.373,00)
7.01.7-01.0-00.0-00.02.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.103.510,00	4.969.137,00	(2.134.373,00)
7.01.7-01.0-00.0-00.02.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.899.210,00	2.371.517,00	(1.527.693,00)
7.01.7-01.0-00.0-00.02.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.204.300,00	2.597.620,00	(606.680,00)
7.01.7-01.0-00.0-00.02.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.408.600,00	6.408.600,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	6.408.600,00	6.408.600,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.204.300,00	3.204.300,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.02.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	3.204.300,00	3.204.300,00	-
				-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.03. Kecamatan Tanjung Karang Timur

7.01.7-01.0-00.0-00.03	Kecamatan Tanjung Karang Timur	9.371.311.868,00	11.254.772.344,00	1.883.460.476,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.546.000.768,00	5.220.461.244,00	674.460.476,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2.500.000,00	2.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.526.711.868,00	4.000.552.344,00	473.840.476,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.448.711.868,00	3.911.852.344,00	463.140.476,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	78.000.000,00	88.700.000,00	10.700.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.975.750,00	88.975.750,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.125.332,00	11.125.332,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.850.418,00	6.850.418,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.370.000,00	909.990.000,00	180.620.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	23.000.000,00	23.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	706.370.000,00	886.990.000,00	180.620.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.443.150,00	197.443.150,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	33.530.000,00	33.530.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	81.473.150,00	81.473.150,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.440.000,00	25.440.000,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	2.558.711.100,00	2.978.711.100,00	420.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.240.000,00	27.240.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	27.240.000,00	27.240.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.531.471.100,00	2.951.471.100,00	420.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.531.471.100,00	2.951.471.100,00	420.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	477.350.000,00	977.350.000,00	500.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	427.350.000,00	427.350.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	427.350.000,00	427.350.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	500.000.000,00	500.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	500.000.000,00	500.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	5.000.000,00	5.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.775.250.000,00	2.064.250.000,00	289.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.775.250.000,00	2.064.250.000,00	289.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1.750.500.000,00	2.039.500.000,00	289.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.750.000,00	24.750.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.000.000,00	4.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.06.2.02	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.06.2.02.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.03.06.2.02.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	-
				-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.04. Kecamatan Telukbetung Utara

7.01.7-01.0-00.0-00.04	Kecamatan Telukbetung Utara	11.218.628.771,00	13.564.869.511,00	2.346.240.740,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.604.578.771,00	5.461.069.511,00	856.490.740,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.641.678.771,00	4.222.480.911,00	580.802.140,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.546.678.771,00	4.114.880.911,00	568.202.140,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	95.000.000,00	107.600.000,00	12.600.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.089.412,00	88.373.012,00	67.283.600,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.089.412,00	14.373.012,00	11.283.600,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.000.000,00	22.000.000,00	19.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.500.000,00	50.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	24.500.000,00	24.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000,00	13.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.000.000,00	13.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	710.760.000,00	884.760.000,00	174.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	29.000.000,00	29.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	681.760.000,00	855.760.000,00	174.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.550.588,00	205.955.588,00	34.405.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.532.088,00	47.668.088,00	14.136.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.018.500,00	139.821.100,00	13.802.600,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	3.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.810.000,00	810.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	8.656.400,00	5.656.400,00
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	3.700.050.000,00	4.270.550.000,00	570.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000,00	30.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	30.000.000,00	30.000.000,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.670.050.000,00	4.240.550.000,00	570.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.670.050.000,00	4.240.550.000,00	570.500.000,00
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	684.750.000,00	1.241.000.000,00	556.250.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	624.750.000,00	581.000.000,00	(43.750.000,00)
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	624.750.000,00	581.000.000,00	(43.750.000,00)
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	600.000.000,00	600.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	600.000.000,00	600.000.000,00
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	60.000.000,00	60.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	6.000.000,00	6.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	6.000.000,00	6.000.000,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.219.250.000,00	2.582.250.000,00	363.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.219.250.000,00	2.582.250.000,00	363.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.195.750.000,00	2.558.750.000,00	363.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.04.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.500.000,00	23.500.000,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.04.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-
				-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.05. Kecamatan Telukbetung Barat

7.01.7-01.0-00.0-00.05	Kecamatan Telukbetung Barat	8.319.968.599,00	10.130.357.270,00	1.810.388.671,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.619.171.012,00	4.270.559.683,00	651.388.671,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.777.030,00	12.777.030,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.259.010,00	4.259.010,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.259.010,00	4.259.010,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.259.010,00	4.259.010,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.756.818.599,00	3.211.803.230,00	454.984.631,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.680.718.599,00	3.122.803.230,00	442.084.631,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	76.100.000,00	89.000.000,00	12.900.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.493.578,00	86.493.578,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	7.986.510,00	7.986.510,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.320.000,00	19.320.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.598.123,00	7.598.123,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.125.000,00	13.125.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.837.437,00	11.837.437,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.626.508,00	26.626.508,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.341.250,00	42.341.250,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	11.550.000,00	11.550.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	11.550.000,00	11.550.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.241.250,00	19.241.250,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540.300.000,00	688.774.140,00	148.474.140,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	26.460.000,00	38.934.140,00	12.474.140,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	513.840.000,00	649.840.000,00	136.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.440.555,00	228.370.455,00	27.929.900,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.840.000,00	55.889.900,00	12.049.900,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.005.540,00	137.885.540,00	15.880.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	11.040.015,00	11.040.015,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.955.000,00	10.955.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.300.000,00	6.300.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.300.000,00	6.300.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	2.388.697.983,00	2.773.697.983,00	385.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.113.182,00	26.113.182,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	26.113.182,00	26.113.182,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.362.584.801,00	2.747.584.801,00	385.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.362.584.801,00	2.747.584.801,00	385.000.000,00
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	603.362.703,00	1.103.362.703,00	500.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	553.362.703,00	553.362.703,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	553.362.703,00	553.362.703,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	500.000.000,00	500.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	500.000.000,00	500.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	5.000.000,00	5.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	5.000.000,00	5.000.000,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.680.872.670,00	1.954.872.670,00	274.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.680.872.670,00	1.954.872.670,00	274.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1.655.872.670,00	1.929.872.670,00	274.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.05.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.260.231,00	11.260.231,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.260.231,00	11.260.231,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.262.231,00	5.262.231,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.998.000,00	5.998.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.604.000,00	16.604.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.604.000,00	16.604.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.979.000,00	10.979.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.05.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.625.000,00	5.625.000,00	-
				-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.06. Kecamatan Telukbetung Selatan

7.01.7-01.0-00.0-00.06	Kecamatan Telukbetung Selatan	10.381.726.229,00	12.685.278.662,00	2.303.552.433,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.360.333.529,00	5.156.573.462,00	796.239.933,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	700.000,00	700.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	700.000,00	700.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	700.000,00	700.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.192.726.229,00	3.693.036.162,00	500.309.933,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.077.226.229,00	3.561.336.162,00	484.109.933,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	115.500.000,00	131.700.000,00	16.200.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.227.490,00	118.227.490,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	5.634.535,00	5.634.535,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.875.111,00	36.875.111,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.014.207,00	16.014.207,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.703.637,00	15.703.637,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	853.980.000,00	1.069.445.000,00	215.465.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000,00	33.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	820.980.000,00	1.036.445.000,00	215.465.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.299.810,00	273.764.810,00	60.465.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.532.088,00	45.582.088,00	12.050.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.039.122,00	179.454.122,00	33.415.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.128.600,00	27.128.600,00	15.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.100.000,00	15.100.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.06.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	3.316.904.200,00	3.862.904.200,00	546.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.088.700,00	29.088.700,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29.088.700,00	29.088.700,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.287.815.500,00	3.833.815.500,00	546.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.287.815.500,00	3.833.815.500,00	546.000.000,00
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	555.873.000,00	1.155.873.000,00	600.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	495.873.000,00	495.873.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	495.873.000,00	495.873.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	600.000.000,00	600.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	600.000.000,00	600.000.000,00
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	60.000.000,00	60.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	6.000.000,00	6.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.06.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.144.015.500,00	2.495.015.500,00	351.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.144.015.500,00	2.495.015.500,00	351.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.121.400.000,00	2.472.400.000,00	351.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.615.500,00	22.615.500,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.300.000,00	12.612.500,00	10.312.500,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.300.000,00	12.612.500,00	10.312.500,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1.150.000,00	11.462.500,00	10.312.500,00
7.01.7-01.0-00.0-00.06.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.150.000,00	1.150.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.300.000,00	2.300.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	2.300.000,00	2.300.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.150.000,00	1.150.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.06.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	1.150.000,00	1.150.000,00	-
				-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.07. Kecamatan Kedaton

7.01.7-01.0-00.0-00.07	Kecamatan Kedaton	11.200.678.339,00	13.658.833.966,00	2.458.155.627,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.084.364.041,00	5.927.519.668,00	843.155.627,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.048.135,00	19.048.135,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.116.619,00	6.116.619,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.436.846,00	6.436.846,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.494.670,00	6.494.670,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.846.328.340,00	4.441.483.967,00	595.155.627,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.745.628.340,00	4.327.983.967,00	582.355.627,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	100.700.000,00	113.500.000,00	12.800.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.193.721,00	98.193.721,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	9.345.390,00	9.345.390,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.471.950,00	18.471.950,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.685.491,00	12.685.491,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.625.000,00	20.625.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.065.890,00	16.065.890,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000,00	21.000.000,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.994.077,00	13.994.077,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	494.077,00	494.077,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	870.736.000,00	1.098.736.000,00	228.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000,00	22.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	848.736.000,00	1.076.736.000,00	228.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.063.768,00	256.063.768,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.532.076,00	33.532.076,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.915.005,00	178.915.005,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	375.000,00	375.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.900.000,00	1.900.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.141.687,00	25.141.687,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.200.000,00	16.200.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	3.364.834.986,00	3.917.834.986,00	553.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.137.521,00	34.137.521,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.137.521,00	34.137.521,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.330.697.465,00	3.883.697.465,00	553.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.330.697.465,00	3.883.697.465,00	553.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	503.405.498,00	1.203.405.498,00	700.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	433.405.498,00	433.405.498,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	433.405.498,00	433.405.498,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	70.000.000,00	70.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.245.022.470,00	2.607.022.470,00	362.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.245.022.470,00	2.607.022.470,00	362.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.187.816.735,00	2.549.816.735,00	362.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.07.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	57.205.735,00	57.205.735,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.686.418,00	1.686.418,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	1.686.418,00	1.686.418,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan	874.924,00	874.924,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	811.494,00	811.494,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.364.926,00	1.364.926,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	1.364.926,00	1.364.926,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	682.688,00	682.688,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.07.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	682.238,00	682.238,00	-
				-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.08. Kecamatan Sukarame

7.01.7-01.0-00.0-00.08	Kecamatan Sukarame	10.816.440.526,00	13.190.990.169,00	2.374.549.643,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.393.332.981,00	6.396.882.624,00	1.003.549.643,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.342.440.526,00	4.964.218.319,00	621.777.793,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.267.140.526,00	4.870.918.319,00	603.777.793,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	75.300.000,00	93.300.000,00	18.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.526.386,00	51.526.386,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	2.754.254,00	2.754.254,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.555.440,00	10.555.440,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.278.422,00	5.278.422,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	937.500,00	937.500,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.770,00	10.000.770,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000,00	22.000.000,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	857.440.000,00	1.078.720.000,00	221.280.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	839.440.000,00	1.060.720.000,00	221.280.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.926.069,00	289.417.919,00	140.491.850,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.780.000,00	47.921.850,00	36.141.850,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.327.669,00	163.637.669,00	66.310.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.250.000,00	1.250.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000,00	250.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.218.400,00	66.258.400,00	38.040.000,00

7.01.7-01.0-00.0-00.08.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.100.000,00	10.100.000,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	2.875.155.225,00	3.347.655.225,00	472.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.500.000,00	29.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29.500.000,00	29.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.845.655.225,00	3.318.155.225,00	472.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.845.655.225,00	3.318.155.225,00	472.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	626.574.324,00	1.226.574.324,00	600.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	566.574.324,00	566.574.324,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	566.574.324,00	566.574.324,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	600.000.000,00	600.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	600.000.000,00	600.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	60.000.000,00	60.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	6.000.000,00	6.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.08.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.917.377.996,00	2.215.877.996,00	298.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.917.377.996,00	2.215.877.996,00	298.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1.894.577.996,00	2.193.077.996,00	298.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.08.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.800.000,00	22.800.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.08.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	1.000.000,00	1.000.000,00	-
				-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.09. Kecamatan Panjang

7.01.7-01.0-00.0-00.09	Kecamatan Panjang	13.985.841.385,00	16.941.463.985,00	2.955.622.600,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.635.057.041,00	5.418.179.641,00	783.122.600,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.834.070,81	6.834.070,81	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.315.000,00	2.315.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.058.875,81	2.058.875,81	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.460.195,00	2.460.195,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.329.716.385,00	3.829.615.985,00	499.899.600,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.260.716.385,00	3.760.615.985,00	499.899.600,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	69.000.000,00	69.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.984.871,00	98.984.871,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	3.775.000,00	3.775.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.717.521,00	15.717.521,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.655.350,00	11.655.350,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.250.000,00	20.250.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.587.000,00	3.587.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.000.000,00	44.000.000,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	894.660.000,00	1.122.660.000,00	228.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	30.360.000,00	30.360.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	864.300.000,00	1.092.300.000,00	228.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.861.714,19	345.084.714,19	35.223.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.075.000,00	27.075.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	257.264.550,00	292.487.550,00	35.223.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.406.164,19	5.406.164,19	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.116.000,00	20.116.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.09.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	5.254.350.800,00	6.118.850.800,00	864.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.435.000,00	38.435.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	38.435.000,00	38.435.000,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.215.915.800,00	6.080.415.800,00	864.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.215.915.800,00	6.080.415.800,00	864.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	965.500.000,00	1.765.500.000,00	800.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	885.500.000,00	885.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	885.500.000,00	885.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	800.000.000,00	800.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	800.000.000,00	800.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	80.000.000,00	80.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	8.000.000,00	8.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	8.000.000,00	8.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	8.000.000,00	8.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	8.000.000,00	8.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	8.000.000,00	8.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	8.000.000,00	8.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	8.000.000,00	8.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	8.000.000,00	8.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.09.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.126.933.544,00	3.634.933.544,00	508.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.126.933.544,00	3.634.933.544,00	508.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.102.320.000,00	3.610.320.000,00	508.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.09.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.613.544,00	24.613.544,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.09.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	1.000.000,00	1.000.000,00	-
				-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.10. Kecamatan Rajabasa

7.01.7-01.0-00.0-00.10	Kecamatan Rajabasa	11.351.786.932,00	13.671.765.948,00	2.319.979.016,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.939.831.932,00	6.806.810.948,00	866.979.016,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.650.000,00	14.650.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.950.000,00	4.950.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.850.000,00	4.850.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.850.000,00	4.850.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.961.860.332,00	5.613.681.398,00	651.821.066,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.882.786.932,00	5.517.257.998,00	634.471.066,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	79.073.400,00	96.423.400,00	17.350.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.890.746,00	60.890.746,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	3.890.000,00	3.890.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.152.100,00	22.152.100,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.583.396,00	3.583.396,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.465.250,00	5.465.250,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000,00	21.000.000,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.325.211,00	37.325.211,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	16.000.000,00	16.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.325.211,00	6.325.211,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	664.260.000,00	836.260.000,00	172.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	624.260.000,00	796.260.000,00	172.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.845.643,00	244.003.593,00	23.157.950,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.532.088,00	38.152.088,00	4.620.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.948.555,00	163.486.505,00	18.537.950,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.500.000,00	2.500.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.050.000,00	28.050.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.315.000,00	9.315.000,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	2.712.102.500,00	3.149.602.500,00	437.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.090.000,00	37.090.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	37.090.000,00	37.090.000,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.675.012.500,00	3.112.512.500,00	437.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.675.012.500,00	3.112.512.500,00	437.500.000,00
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	752.205.000,00	1.452.205.000,00	700.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	682.205.000,00	682.205.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	682.205.000,00	682.205.000,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	700.000.000,00	700.000.000,00
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	70.000.000,00	70.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.937.647.500,00	2.253.147.500,00	315.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.937.647.500,00	2.253.147.500,00	315.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1.913.085.000,00	2.228.585.000,00	315.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.10.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.562.500,00	24.562.500,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.500.000,00	2.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.10.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	2.500.000,00	2.500.000,00	-
				-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.11. Kecamatan Tanjung Senang

7.01.7-01.0-00.0-00.11	Kecamatan Tanjung Senang	9.208.307.894,00	11.051.350.592,00	1.843.042.698,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.141.236.515,00	4.748.279.213,00	607.042.698,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.311.270,00	32.311.270,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.031.850,00	11.031.850,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.792.790,00	10.792.790,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.486.630,00	10.486.630,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.403.312.894,00	3.866.355.592,00	463.042.698,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.334.232.894,00	3.797.275.592,00	463.042.698,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	69.080.000,00	69.080.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.951.651,00	60.951.651,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1.122.375,00	1.122.375,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.873.492,00	13.873.492,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.131.200,00	10.131.200,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.762.500,00	10.762.500,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.062.084,00	25.062.084,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.420.000,00	573.420.000,00	124.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	32.100.000,00	32.100.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	417.320.000,00	541.320.000,00	124.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.240.700,00	215.240.700,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.350.000,00	33.350.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.140.700,00	146.140.700,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	250.000,00	250.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000,00	28.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.11.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	2.688.780.117,00	3.129.780.117,00	441.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.605.850,00	26.605.850,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	26.605.850,00	26.605.850,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.662.174.267,00	3.103.174.267,00	441.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.662.174.267,00	3.103.174.267,00	441.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	526.750.000,00	1.026.750.000,00	500.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	476.750.000,00	476.750.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	476.750.000,00	476.750.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	500.000.000,00	500.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	500.000.000,00	500.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	5.000.000,00	5.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.11.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.833.755.660,00	2.128.755.660,00	295.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.833.755.660,00	2.128.755.660,00	295.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1.811.212.300,00	2.106.212.300,00	295.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.11.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.543.360,00	22.543.360,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.469.226,00	4.469.226,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	4.469.226,00	4.469.226,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1.291.676,00	1.291.676,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.177.550,00	3.177.550,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.316.376,00	13.316.376,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.316.376,00	13.316.376,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.166.676,00	3.166.676,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.11.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.149.700,00	10.149.700,00	-
				-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.12. Kecamatan Sukabumi

7.01.7-01.0-00.0-00.12	Kecamatan Sukabumi	12.164.427.942,00	14.790.587.274,00	2.626.159.332,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.366.928.863,00	6.300.088.195,00	933.159.332,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.814.434,00	10.814.434,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.042.247,00	3.042.247,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.340.361,00	4.340.361,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.431.826,00	3.431.826,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.893.585.753,00	4.536.435.085,00	642.849.332,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.794.977.942,00	4.437.827.274,00	642.849.332,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	98.607.811,00	98.607.811,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.788.112,00	62.788.112,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	3.514.319,00	3.514.319,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.170.776,00	10.170.776,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.580.315,00	7.580.315,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.125.000,00	10.125.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.325.452,00	10.325.452,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.072.250,00	21.072.250,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.464.000,00	22.464.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	12.000.000,00	12.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	464.000,00	464.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.164.436.000,00	1.434.746.000,00	270.310.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	23.000.000,00	23.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.141.436.000,00	1.411.746.000,00	270.310.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.840.564,00	232.840.564,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.532.076,00	33.532.076,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.947.536,00	168.947.536,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	200.000,00	200.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	725.000,00	725.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.935.952,00	21.935.952,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	3.692.660.088,00	4.298.160.088,00	605.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.094.262,00	43.094.262,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	43.094.262,00	43.094.262,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.649.565.826,00	4.255.065.826,00	605.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.649.565.826,00	4.255.065.826,00	605.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	721.883.046,00	1.421.883.046,00	700.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	651.883.046,00	651.883.046,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	651.883.046,00	651.883.046,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	70.000.000,00	70.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.365.119.497,00	2.752.619.497,00	387.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.365.119.497,00	2.752.619.497,00	387.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional	2.342.048.429,00	2.729.548.429,00	387.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.12.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.071.068,00	23.071.068,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.672.270,00	12.672.270,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	12.672.270,00	12.672.270,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan	6.230.344,00	6.230.344,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.441.926,00	6.441.926,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.164.178,00	5.164.178,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	5.164.178,00	5.164.178,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.950.109,00	2.950.109,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.12.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	2.214.069,00	2.214.069,00	-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.13. Kecamatan Kemiling

7.01.7-01.0-00.0-00.13	Kecamatan Kemiling	16.863.795.208,00	20.343.025.826,00	3.479.230.618,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.713.047.261,00	7.758.777.879,00	1.045.730.618,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.424.858.208,00	6.167.789.826,00	742.931.618,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.341.020.208,00	6.064.751.826,00	723.731.618,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	83.838.000,00	103.038.000,00	19.200.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.870.160,00	38.870.160,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	2.300.500,00	2.300.500,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.282.910,00	10.282.910,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.616.750,00	1.616.750,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.670.000,00	2.670.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	833.009.800,00	1.101.662.800,00	268.653.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	41.200.000,00	41.200.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	791.809.800,00	1.060.462.800,00	268.653.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	433.309.093,00	447.455.093,00	14.146.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.540.678,00	33.540.678,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	391.768.415,00	405.914.415,00	14.146.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.13.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	5.905.747.947,00	6.875.247.947,00	969.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	57.139.297,00	57.139.297,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	57.139.297,00	57.139.297,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.848.608.650,00	6.818.108.650,00	969.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.848.608.650,00	6.818.108.650,00	969.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	806.500.000,00	1.706.500.000,00	900.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	716.500.000,00	716.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	716.500.000,00	716.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	900.000.000,00	900.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	900.000.000,00	900.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	90.000.000,00	90.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	9.000.000,00	9.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	9.000.000,00	9.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	9.000.000,00	9.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak	9.000.000,00	9.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	9.000.000,00	9.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	9.000.000,00	9.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	9.000.000,00	9.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	9.000.000,00	9.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.13.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.434.500.000,00	3.998.500.000,00	564.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.434.500.000,00	3.998.500.000,00	564.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional	3.412.000.000,00	3.976.000.000,00	564.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.13.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.500.000,00	22.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	-
				-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.14. Kecamatan Enggal

7.01.7-01.0-00.0-00.14	Kecamatan Enggal	9.725.014.877,00	11.843.324.015,00	2.118.309.138,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.433.962.404,00	5.199.271.542,00	765.309.138,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.935.800,00	8.935.800,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.978.600,00	2.978.600,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.978.600,00	2.978.600,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.978.600,00	2.978.600,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.566.239.877,00	4.122.342.935,00	556.103.058,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.483.439.877,00	4.005.142.935,00	521.703.058,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	82.800.000,00	117.200.000,00	34.400.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.611.026,00	112.267.106,00	33.656.080,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1.804.041,00	1.804.041,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.133.537,00	19.133.537,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.770.680,00	29.426.760,00	13.656.080,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.402.768,00	15.402.768,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	553.120.000,00	728.670.000,00	175.550.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	541.120.000,00	716.670.000,00	175.550.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.055.701,00	210.055.701,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.535.088,00	43.535.088,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.029.813,00	125.029.813,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.750.000,00	2.750.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.876.800,00	11.876.800,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.864.000,00	20.864.000,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	2.719.209.764,00	3.160.209.764,00	441.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.810.000,00	38.810.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	38.810.000,00	38.810.000,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.680.399.764,00	3.121.399.764,00	441.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.680.399.764,00	3.121.399.764,00	441.000.000,00
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	643.909.370,00	1.243.909.370,00	600.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	593.909.370,00	593.909.370,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	593.909.370,00	593.909.370,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	600.000.000,00	600.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	600.000.000,00	600.000.000,00
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	5.000.000,00	5.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.917.933.339,00	2.229.933.339,00	312.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.917.933.339,00	2.229.933.339,00	312.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1.889.433.339,00	2.201.433.339,00	312.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	28.500.000,00	28.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.500.000,00	2.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.14.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	-
				-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.15. Kecamatan Kedamaian

7.01.7-01.0-00.0-00.15	Kecamatan Kedamaian	11.193.470.717,00	13.581.000.779,00	2.387.530.062,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.209.785.617,00	6.047.815.679,00	838.030.062,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.300.000,00	6.300.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.100.000,00	2.100.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.918.705.717,00	4.498.135.779,00	579.430.062,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.850.545.717,00	4.415.275.779,00	564.730.062,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	68.160.000,00	82.860.000,00	14.700.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.447.118,00	73.447.118,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	6.092.816,00	6.092.816,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.376.912,00	12.376.912,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.509.490,00	10.509.490,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.750.000,00	12.750.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.717.900,00	10.717.900,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000,00	21.000.000,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.000.000,00	72.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	20.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	909.500.000,00	1.133.500.000,00	224.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000,00	14.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	895.500.000,00	1.119.500.000,00	224.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.832.782,00	264.432.782,00	14.600.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.532.088,00	33.532.088,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.472.390,00	174.072.390,00	14.600.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	3.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.736.304,00	33.736.304,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.592.000,00	16.592.000,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	3.072.441.200,00	3.576.441.200,00	504.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.685.600,00	35.685.600,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.685.600,00	35.685.600,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.036.755.600,00	3.540.755.600,00	504.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.036.755.600,00	3.540.755.600,00	504.000.000,00
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	790.385.500,00	1.490.385.500,00	700.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	720.385.500,00	720.385.500,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	720.385.500,00	720.385.500,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	700.000.000,00	700.000.000,00
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	70.000.000,00	70.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.15.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.112.858.400,00	2.458.358.400,00	345.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.112.858.400,00	2.458.358.400,00	345.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.090.258.400,00	2.435.758.400,00	345.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.15.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.600.000,00	22.600.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.000.000,00	4.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.000.000,00	4.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	4.000.000,00	4.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.15.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	2.000.000,00	2.000.000,00	-
				-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.16. Kecamatan Telukbetung Timur

7.01.7-01.0-00.0-00.16	Kecamatan Telukbetung Timur	8.948.373.436,00	10.946.591.002,00	1.998.217.566,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.128.926.622,00	4.833.644.188,00	704.717.566,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.420.797,00	9.420.797,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.063.776,00	3.063.776,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.282.513,00	3.282.513,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.074.508,00	3.074.508,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.839.448.436,00	3.304.166.002,00	464.717.566,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.743.448.436,00	3.208.166.002,00	464.717.566,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	96.000.000,00	96.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.380.725,00	90.380.725,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	12.320.878,00	12.320.878,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.436.573,00	15.436.573,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.131.277,00	12.131.277,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.212.424,00	11.212.424,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.279.573,00	26.279.573,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.250.000,00	34.250.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	11.250.000,00	11.250.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	958.000.000,00	1.178.000.000,00	220.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	25.500.000,00	25.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	932.500.000,00	1.152.500.000,00	220.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.426.664,00	217.426.664,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.532.088,00	33.532.088,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.654.576,00	126.654.576,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	500.000,00	500.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.740.000,00	20.740.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	2.463.093.569,00	2.865.593.569,00	402.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.772.824,00	29.772.824,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29.772.824,00	29.772.824,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.433.320.745,00	2.835.820.745,00	402.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.433.320.745,00	2.835.820.745,00	402.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	550.204.502,00	1.150.204.502,00	600.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	490.204.502,00	490.204.502,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	490.204.502,00	490.204.502,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	600.000.000,00	600.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	600.000.000,00	600.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	60.000.000,00	60.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.16.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.786.148.743,00	2.077.148.743,00	291.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.786.148.743,00	2.077.148.743,00	291.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1.762.427.368,00	2.053.427.368,00	291.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.721.375,00	23.721.375,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	10.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.16.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.17. Kecamatan Bumi Waras

7.01.7-01.0-00.0-00.17	Kecamatan Bumi Waras	10.359.678.956,00	12.447.880.563,00	2.088.201.607,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.075.372.529,00	4.748.074.136,00	672.701.607,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.656.000,00	31.656.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.552.000,00	10.552.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.552.000,00	10.552.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.552.000,00	10.552.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.953.103.956,00	3.396.805.563,00	443.701.607,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.870.603.956,00	3.297.805.563,00	427.201.607,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	82.500.000,00	99.000.000,00	16.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.887.569,00	92.887.569,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	10.275.000,00	10.275.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.593.959,00	18.593.959,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.582.859,00	11.582.859,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.435.751,00	10.435.751,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.000.000,00	27.000.000,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.603.565,00	34.603.565,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	11.000.000,00	11.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.103.565,00	11.103.565,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	872.950.000,00	1.081.950.000,00	209.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	8.200.000,00	17.200.000,00	9.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	864.750.000,00	1.064.750.000,00	200.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.171.439,00	110.171.439,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	33.532.088,00	33.532.088,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	48.261.377,91	48.261.377,91	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.589.036,00	4.589.036,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.668.937,09	2.668.937,09	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.120.000,00	10.120.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	3.423.200.645,00	3.986.700.645,00	563.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.470.000,00	26.470.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	26.470.000,00	26.470.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.396.730.645,00	3.960.230.645,00	563.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.396.730.645,00	3.960.230.645,00	563.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	684.648.480,00	1.184.648.480,00	500.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	634.648.480,00	634.648.480,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	634.648.480,00	634.648.480,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	500.000.000,00	500.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	500.000.000,00	500.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.17.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.156.457.302,00	2.508.457.302,00	352.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.156.457.302,00	2.508.457.302,00	352.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.132.457.302,00	2.484.457.302,00	352.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.17.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.000.000,00	24.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	10.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.17.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-
				-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.18. Kecamatan Labuhan Ratu

7.01.7-01.0-00.0-00.18	Kecamatan Labuhan Ratu	10.125.996.877,00	12.156.597.338,00	2.030.600.461,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.466.446.951,00	6.212.047.412,00	745.600.461,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.676.346.877,00	5.245.947.338,00	569.600.461,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.584.546.877,00	5.154.147.338,00	569.600.461,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	91.800.000,00	91.800.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.373.670,00	88.373.670,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.003.132,00	14.003.132,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.967.538,00	13.967.538,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.100.000,00	12.100.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.303.000,00	13.303.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000,00	22.000.000,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.500.000,00	37.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	22.500.000,00	22.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.500.000,00	656.500.000,00	156.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	488.500.000,00	644.500.000,00	156.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.726.404,00	177.726.404,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.532.088,00	33.532.088,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.194.316,00	65.194.316,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	500.000,00	500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000,00	500.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.000.000,00	57.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.000,00	21.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	2.411.140.809,00	2.806.640.809,00	395.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.475.078,00	29.475.078,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29.475.078,00	29.475.078,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.381.665.731,00	2.777.165.731,00	395.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.381.665.731,00	2.777.165.731,00	395.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	467.033.653,00	1.067.033.653,00	600.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	407.033.653,00	407.033.653,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	407.033.653,00	407.033.653,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	600.000.000,00	600.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	600.000.000,00	600.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	60.000.000,00	60.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	6.000.000,00	6.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.18.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.773.375.464,00	2.062.875.464,00	289.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.773.375.464,00	2.062.875.464,00	289.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1.750.497.500,00	2.039.997.500,00	289.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.18.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.877.964,00	22.877.964,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.000.000,00	4.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.000.000,00	4.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.18.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-
				-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.19. Kecamatan Way Halim

7.01.7-01.0-00.0-00.19	Kecamatan Way Halim	12.755.587.706,00	15.298.950.876,00	2.543.363.170,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.216.082.301,00	6.061.945.471,00	845.863.170,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.086.277,00	3.086.277,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.028.759,00	1.028.759,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.028.759,00	1.028.759,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.028.759,00	1.028.759,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.987.192.706,00	4.547.855.876,00	560.663.170,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.852.162.706,00	4.397.525.876,00	545.363.170,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	135.030.000,00	150.330.000,00	15.300.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.564.134,00	96.470.557,00	33.906.423,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	5.217.808,00	5.217.808,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.767.842,50	16.674.265,50	4.906.423,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.443.911,50	11.443.911,50	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.634.572,00	10.634.572,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.000.000,00	40.000.000,00	29.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.082.928,00	29.082.928,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10.500.000,00	10.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.875.000,00	7.875.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.707.928,00	10.707.928,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.065.400.000,00	1.313.100.000,00	247.700.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	29.500.000,00	29.500.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.035.900.000,00	1.283.600.000,00	247.700.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.756.256,00	72.349.833,00	3.593.577,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.530.000,00	33.530.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.771.700,00	20.771.700,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	875.000,00	875.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	875.000,00	875.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.475.756,00	14.069.333,00	3.593.577,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.228.800,00	2.228.800,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	4.245.758.796,00	4.942.258.796,00	696.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.412.478,00	29.412.478,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.02.2.01.01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29.412.478,00	29.412.478,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.216.346.318,00	4.912.846.318,00	696.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.216.346.318,00	4.912.846.318,00	696.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	694.822.300,00	1.277.322.300,00	582.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	629.122.890,00	611.622.890,00	(17.500.000,00)
7.01.7-01.0-00.0-00.19.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	629.122.890,00	611.622.890,00	(17.500.000,00)
7.01.7-01.0-00.0-00.19.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	600.000.000,00	600.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	600.000.000,00	600.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	65.699.410,00	65.699.410,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	6.569.941,00	6.569.941,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	6.569.941,00	6.569.941,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	6.569.941,00	6.569.941,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	6.569.941,00	6.569.941,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	6.569.941,00	6.569.941,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	6.569.941,00	6.569.941,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	6.569.941,00	6.569.941,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	6.569.941,00	6.569.941,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.19.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	6.569.941,00	6.569.941,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	6.569.941,00	6.569.941,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.553.568.738,00	2.972.068.738,00	418.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.553.568.738,00	2.972.068.738,00	418.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.530.777.964,00	2.949.277.964,00	418.500.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.19.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.790.774,00	22.790.774,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.296.047,00	22.296.047,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.296.047,00	22.296.047,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	11.285.035,00	11.285.035,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.011.012,00	11.011.012,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.059.524,00	23.059.524,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	23.059.524,00	23.059.524,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.548.512,00	11.548.512,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.19.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	11.511.012,00	11.511.012,00	-
				-

Urusan : 7.01. KECAMATAN
Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.20. Kecamatan Langkapura

7.01.7-01.0-00.0-00.20	Kecamatan Langkapura	8.005.213.748,00	9.721.061.738,00	1.715.847.990,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.002.067.548,00	4.661.915.538,00	659.847.990,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.378.700,00	26.378.700,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	8.792.900,00	8.792.900,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.792.900,00	8.792.900,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.792.900,00	8.792.900,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.055.133.748,00	3.503.271.738,00	448.137.990,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.975.513.748,00	3.410.851.738,00	435.337.990,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	79.620.000,00	92.420.000,00	12.800.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.716.828,00	75.716.828,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	6.859.200,00	6.859.200,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.722.628,00	19.722.628,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.925.000,00	7.925.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.200.000,00	11.200.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.010.000,00	9.010.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000,00	21.000.000,00	20.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.700.000,00	878.550.000,00	177.850.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	14.200.000,00	14.200.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	686.500.000,00	864.350.000,00	177.850.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.138.272,00	154.998.272,00	13.860.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.232.088,00	29.232.088,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.406.184,00	95.266.184,00	13.860.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.500.000,00	1.500.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	1.951.717.450,00	2.266.717.450,00	315.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.707.200,00	38.707.200,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.02.2.01.01	Koordinasi Sinergy Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	38.707.200,00	38.707.200,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.913.010.250,00	2.228.010.250,00	315.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.913.010.250,00	2.228.010.250,00	315.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	531.250.750,00	1.031.250.750,00	500.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	481.250.750,00	481.250.750,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	481.250.750,00	481.250.750,00	-
				-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	500.000.000,00	500.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	500.000.000,00	500.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.03.2.06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.03.2.06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-

7.01.7-01.0-00.0-00.20.03.2.06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	5.000.000,00	5.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.496.178.000,00	1.737.178.000,00	241.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.496.178.000,00	1.737.178.000,00	241.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1.473.003.000,00	1.714.003.000,00	241.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.20.04.2.01.02	harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	23.175.000,00	23.175.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.000.000,00	12.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.05.2.01.02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.000.000,00	12.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	-
7.01.7-01.0-00.0-00.20.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	-
				-

Urusan : 8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.8-01.0-00.0-00.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.230.305.034,00	10.047.408.016,00	1.817.102.982,00
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.230.305.034,00	10.047.408.016,00	1.817.102.982,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.230.305.034,00	10.047.408.016,00	1.817.102.982,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.795.687.634,00	3.162.790.616,00	367.102.982,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.468.207.634,00	2.815.310.616,00	347.102.982,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.342.687.634,00	2.689.790.616,00	347.102.982,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	125.520.000,00	125.520.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.247.653,00	91.247.653,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000,00	7.500.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.747.653,00	27.747.653,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.000.000,00	88.000.000,00	20.000.000,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	20.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.08.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.000.000,00	68.000.000,00	20.000.000,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.732.347,00	45.732.347,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.532.088,00	33.532.088,00	-

8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.200.259,00	6.200.259,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	350.000.000,00	350.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	350.000.000,00	350.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200.000.000,00	200.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.882.542.400,00	1.882.542.400,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	1.882.542.400,00	1.882.542.400,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	125.000.000,00	125.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.757.542.400,00	1.757.542.400,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.362.075.000,00	3.812.075.000,00	1.450.000.000,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.362.075.000,00	3.812.075.000,00	1.450.000.000,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.262.075.000,00	3.712.075.000,00	1.450.000.000,00
8.01.8-01.0-00.0-00.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	-

8.01.8-01.0-00.0-00.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	250.000.000,00	250.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	250.000.000,00	250.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	125.000.000,00	125.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	590.000.000,00	590.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	590.000.000,00	590.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di DAerah	75.000.000,00	75.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di DAerah	250.000.000,00	250.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	-
8.01.8-01.0-00.0-00.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota	175.000.000,00	175.000.000,00	-



3.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui Sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam Periode tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

A. Belanja operasi;

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja bunga;
4. Belanja subsidi;
5. Belanja hibah; dan
6. Belanja bantuan sosial.

B. Belanja modal

C. Belanja tidak terduga; dan

D. Belanja transfer.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1. Belanja bagi hasil; dan
2. Belanja bantuan keuangan

1. Belanja Pegawai

- a) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi, dan penambahan PNSD Kota Bandar Lampung pada tahun 2023, maka diperhitungkan *acress* untuk Belanja Pegawai sebesar 0.76 persen (%).
- b) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, maka dianggarkan biaya pemungutan pajak daerah sebesar 5 persen (%) dari target penerimaan pajak daerah tahun 2023.
- c) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan Belanja Pegawai dalam rangka perhitungan DAU perubahan Tahun Anggaran 2023, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, serta pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas.



d) Belanja Pegawai pada Perubahan APBD tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp. 1.125.937.731.804,34 atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.055.125.019.346,34.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Dan Jasa dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Alokasi anggaran untuk belanja barang dan jasa pada perubahan APBD tahun 2023 direncanakan sebesar Rp1.220.175.952.905,57.

3. Belanja Bunga

Belanja Bunga dianggarkan untuk membayar bunga pinjaman pemerintah. Alokasi anggaran untuk Belanja Bunga pada Perubahan APBD tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,00.

4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan milik pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimport barang dan atw jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas pada umumnya. Dengan kondisi perekonomian saat ini, Alokasi anggaran Belanja Subsidi direncanakan sebesar Rp.2.135.294.534,00.

5. Belanja Hibah

Belanja Hibah dimaksudkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah baik yang dilaksanakan oleh organisasi sosial, organisasi masyarakat, lembaga perorangan, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga lainnya serta bantuan terhadap Partai Politik dengan mengacu pada ketentuan tentang tata cara pemberian hibah yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.



Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah pada perubahan anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.121.562.889.016,00. mengalami kenaikan sebesar Rp.18.511.733.141,00. dibandingkan dengan anggaran Belanja Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.103.051.155.875,00.

6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Bandar Lampung. Bantuan sosial diberikan kepada kelompok /anggota masyarakat yang dalam pemberiannya tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Alokasi anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial pada perubahan anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.249.666.152,00.

7. Belanja Modal

Penganggaran belanja modal diperuntukan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih untuk mendukung jalannya kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Bandar Lampung. Alokasi anggaran untuk belanja modal pada perubahan anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.440.089.780.263,09.

8. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun 2022 dan akan digunakan untuk estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar pengaruh pemerintah kota Bandar Lampung serta tidak biasa/tanggap darurat yang belum tertampung dalam bentuk Program dan Kegiatan pada OPD. Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga pada perubahan anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar Rp14.124.315.370,00.

9. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kelurahan Dan Partai Politik Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja yang dialokasikan untuk pemerintahan kelurahan dan partai politik. Alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan tidak direncanakan pada perubahan anggaran tahun 2023.



Secara terinci, perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.3.



TABEL 3.3
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	PERUBAHAN		
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5 = 4-3
1	Belanja Pegawai	1.055.125.019.346,34	1.125.937.731.804,34	70.812.712.458,00
2	Belanja Barang dan Jasa	882.407.930.775,57	1.220.175.952.905,57	337.768.022.130,00
3	Belanja Bunga	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	-
4	Belanja Subsidi	1.135.294.534,00	2.135.294.534,00	1.000.000.000,00
5	Belanja Hibah	103.051.155.875,00	121.562.889.016,00	18.511.733.141,00
6	Belanja Bantuan Sosial	137.066.152,00	249.666.152,00	112.600.000,00
7	Belanja Modal	270.915.833.592,09	440.089.780.263,09	169.173.946.671,00
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.171.675.958,09	83.725.962.454,09	7.180.699.455,50
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.967.549.765,00	124.325.291.117,00	48.357.741.352,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.108.413.700,00	216.067.679.380,00	106.959.265.680,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.668.194.169,00	15.970.847.312,00	2.302.653.143,00
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
8	Belanja Tidak Terduga	40.075.000.000,00	14.124.315.370,00	(25.950.684.630,00)
9	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
10	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
	Total	2.364.847.300.275,00	2.936.275.630.045,00	571.428.329.770,00



PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Bandar Lampung, 5 September 2023

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
selaku
PIHAK KEDUA

HI. WIYADI, SP, MM.
KETUA

Ir. ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.
WAKIL KETUA I

AEP SARIPUDIN, SP,
WAKIL KETUA II

HI. EDISON HADJAR, SE.
WAKIL KETUA III

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

selaku
PIHAK PERTAMA

HI. EVA DWIANA